



RENJA TAHUN 2025



RENCANA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

KAB. BALANGAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

*Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Telp/Fax. (0526)2029499
Kode Pos 71618 Email: distan.balangkab@gmail.com*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

NOMOR : 188.46/1480/sk/DKPPP-BLG/2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan di bidang Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 no 1447); 9.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008
15. Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025, merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan,

Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Balangan Tahun 2021 - 2026, dan Rencana
Kerja Perencanaan Pembangunan (RKPD)
Kabupaten Balangan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 01 Juli 2024


Plt. KEPALA DINAS,
MUKHLIS, S.Pi.,MM
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19670818 199002 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN NOMOR :
TANGGAL : 01 Juli 2024
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIANN DAN PERIKANAN KAB.
BALANGAN

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN

KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan.....	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan DKP3.....	38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP3 Kabupaten Balangan	40
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN.....	65
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DKP3.....	67
3.3 Program dan Kegiatan.....	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN.....	90
BAB V PENUTUP	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 273 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Renja-PD adalah dokumen perencanaan yang berlaku satu tahun dan dibuat dengan mengacu pada RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta dengan memperhatikan usulan dari masyarakat (*participatory approach*). Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026, mengikuti RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021.

Penyusunan Renja Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan, Sub Kegiatan tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan

Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Tahun 2025 dengan fokus utama adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2024. Perumusan program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tahun 2025 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Dalam rangka penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, maka sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada Pembangunan Pertanian tahap ke-4 dalam RPJPN ini bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan komoditas strategis pertanian berbasis keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia banyak mempengaruhi arah pembangunan pertanian. Dalam merespon dinamika perubahan dimaksud, maka telah dilakukan penyesuaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026. Pertimbangan revisi dimaksud meliputi: 1) Adanya penyesuaian target dan sasaran, perubahan dalam target/fokus kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam struktur penganggaran dan kebijakan yang diambil pada sektor pertanian. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/ 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran SKPD; 2) Merespon

Dinamika kebijakan, melalui penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden, mengharuskan adanya perubahan dan penyelarasan pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Balangan;
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan;
18. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan pada bidang Pertanian dan Perikanan di tahun 2025 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan pertanian dan Perikanan di Kabupaten Balangan, sehingga target kinerja dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025

dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
- c. Menggambarkan kebijakan kinerja yang akan ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun 2023) yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang berpedoman pada Renstra Penyesuaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021 - 2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025 tersaji pada Tabel T-C 29 berikut:

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target Kinerja Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja Renja SKPD 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	75	96,93	-	-	72,70	96,93	72	72	100
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	100,88	85,75	104,57	85,75	100,88	82	82	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100,00	100%	100,00	1,00	100,00	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30 Dokumen	60,00	3 Dokumen	100,00	21 Dokumen	70,00	3	3	100
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	5 Dokumen	125,00	1	1	100
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100

Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	25,00	1	1	100
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24 Laporan	-	4 Laporan	100,00	4,00	16,67	4	4	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20 Laporan	40,00	3 Laporan	100,00	11,00	55,00	3	3	100
Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah		-	-		-	-	0,00			#DIV/0!
Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		-	-		-	-	0,00			#DIV/0!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,00	100%	100,00	1,00	1,00	100%	100%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang /bulan	86,13	130 Orang	98,48	130 Orang	94,89	132,00	132,00	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36 Dokumen	33,33	12 Dokumen	100,00	24 Dokumen	66,67	12,00	12,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	#DIV/0!
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	#DIV/0!

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Laporan	-	-	-	0,00	0	0	#DIV/0!	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,00	100%	100,00	1,00	1,00	100%	100%	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut (Paket)	11 Paket	9,09	3 Paket	100,00	4 Paket	36,36	3	3	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	110 Orang	32,73	4 Orang	100,00	40 Orang	36,36	4	4	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	1,00	100%	100,00	1,00	1,00	100%	100%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7 Paket	28,57	1 Paket	100,00	3 paket	42,86	1	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	-	3 paket	100,00	3 Paket	37,50	3	3	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 paket	33,33	2 Paket	100,00	6,00	50,00	2	2	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Paket	-	2 paket	100,00	2,00	16,67	2 paket	2 paket	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	476 Laporan	-	100 Laporan	100,00	100,00	21,01	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100,00	100%	100,00	1,00	100,00	100%	100%	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1120 Unit	-	2 Unit	1,33	2,00	0,18	150	150	100

Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	170 Unit	4,71	276 Unit	13.800,00	284,00	167,06	2	2	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	336 Unit	-	37 Unit	13,41	37,00	11,01	276	276	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	62 Unit	-	8 Unit	21,62	8,00	12,90	37	37	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	13 Unit	-	8 Unit	100,00	8,00	61,54	8	8	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	12 Bulan	33,33	12 Bulan	100,00	16,00	133,33	12	12	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	72 Laporan	5,56	12 Laporan	100,00	16,00	22,22	12	12	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72 Laporan	5,56	12 Laporan	100,00	16,00	22,22	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	72 Laporan	5,56	12 Laporan	100,00	16,00	22,22	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	12 Bulan	33,33	12 Bulan	100,00	16,00	133,33	12	12	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2104 Unit	-	526 Unit	100,00	526,00	25,00	526	526	100
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5 Unit	-	-	-	-	0,00	2	2	100
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Terpelihara (Unit)	5 Unit	-	-	-	-	0,00	1	1	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2104 Unit	-	526 Unit	100,00	526,00	25,00	526	526	100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23 Unit	-	8 Unit	100,00	8,00	34,78	8	8	100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	1,15%	792,17	0,60	60,00	0,60	52,17	1	1	100
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	10%	-	5,93	118,60	5,93	59,30	5	5	100
	Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	6%	-	6,00	100,00	6,00	100,00	6	6	100
	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	1,15%	15,86	1,36	136,00	1,36	118,26	1	1	100
	Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	1,15%	1.513,04	1,26	126,00	1,26	109,57	1	1	100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah luas peremajaan karet dan luas diversifikasi tanaman perkebunan	704 Ha	-	0 ha	-	-	0,00	175	175	100
	Jumlah Sarana Produksi untuk Pemeliharaan Kebun Daerah	6 Paket	-	0 Paket	-	-	0,00	1	1	100
	Jumlah Sarana Tanaman Pangan yang tersedia	56 Paket	-	0 paket	-	-	0,00	14	14	100
	Jumlah Sarana Hortikultura yang tersedia	40 Paket	-	0 Paket	-	-	0,00	10	10	100
	Jumlah Bibit atau Benih Padi BD dan BP yang bersertifikat	16 Ton	-	0 Ton	-	-	0,00	2	2	100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	-	0 Laporan	-	-	0,00	0	0	0
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	16 Laporan	-	4 Laporan	100,00	4,00	25,00	4	4	100
	Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	16 Laporan	-	4 Laporan	100,00	4,00	25,00	4	4	100

	Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	14 Laporan	-	2 Laporan	100,00	2,00	14,29	2	2	100
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	19 Ton	-		-	-	0,00	2,5	2,5	100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Laporan)	12 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	0
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura (Laporan)	12 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	0
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pasca panen Hasil Perkebunan (Laporan)	12 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	0
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan (Laporan)	12 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	0
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura (Laporan)	12 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	0
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Laporan)	12 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	0
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	660 Ekor	-	115 Ekor	-	115,00	17,42	0	0	0
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0	#DIV/0!	2 VUB	66,67	2,00	#DIV/0!	3	3	100
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	28 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	0
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	6 Dokumen	-		-	-	0,00	1	1	100
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pakan yang beredar	266 Ton	-	51 Ton	86,44	51,00	19,17	59	59	100
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	48 Laporan	25,00	12 Laporan	100,00	24,00	50,00	12	12	100

	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ternak yang Beredar	300 Dosis	-	300 Dosis	100,00	300,00	100,00	300	300	100
		Jumlah Bibit Ternak yang Beredar	219 Ekor	-	219 Ekor	100,00	219,00	100,00	219	219	100
		Jumlah kelahiran ternak di Sentra Kawasan dan Perbibitan Peternakan	7 Ekor	-	1 Ekor	100,00	1,00	14,29	1	1	100
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	12 Laporan	-	12 Laporan	100,00	12,00	100,00	12	12	100
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Laporan)	72 Laporan	19,44	12 Laporan	100,00	12,00	16,67	12	12	100
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penambahan populasi ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	23070 Ekor	-	-	-	-	0,00	0	0	0
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)	22691 Ekor	-	-	-	-	0,00	0	0	0
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1142 Dosis	-	-	-	-	0,00	0	0	0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	44%	-	0,04	1,00	0,04	0,20	4	4	100
		Persentase peningkatan prasarana pertanian	120%	18,64	0,19	0,95	11,99	20,32	20	20	100
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	44 Pekerja	-	18 Pekerja	100,00	18,00	40,91	18	18	100
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	1200 Ha	-	-	-	-	0,00	0	0	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	-	-	-	-	0,00	0	0	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	15 Unit	-	-	-	-	0,00	0	0	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen Hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	6 Unit	-	-	-	-	0,00	0	0	0

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	12 Unit	-	-	-	0,00	0	0	0	
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	15 Unit	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	6 Unit	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	15 Unit	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil Perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	15 Unit	-	-	-	0,00	0	0	0	
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3 Dokumen	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3 Dokumen	-	-	-	0,00	0	0	0	
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 (Dokumen)	3 Dokumen	-	-	-	0,00	0	0	0	
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3 Dokumen	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpenuhi	219 Unit	107,31	237 Unit	607,69	472,00	215,53	39	39	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	12 Unit	-	4 Unit	100,00	4,00	33,33	4	4	100

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	550 Unit	38,36	218 Unit	99,54	429,00	78,00	219	219	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4 Unit	-		-	-	0,00	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	6 Unit	-		-	-	0,00	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	21 Unit	-		-	-	0,00	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	58 Unit	12,07	18 Unit	105,88	25,00	43,10	17	17	100
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	19 Unit	26,32	6 Unit	100,00	11,00	57,89	6	6	100
Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3 Unit	-		-	-	0,00	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	4 Unit	-		-	-	0,00	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3 Unit	-		-	-	0,00	0	0	0
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	469 Ekor	-	115 Ekor	69,70	115,00	24,52	165	165	100
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	36 Laporan	-	12 Laporan	100,00	12,00	33,33	12	12	100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	-	100%	1,00	100,00	100,00	100	100	100
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan surveilans pada Hewan	8 kecamatan	-	0 Kecamatan	-	-	0,00	0	0	0

Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	48 Laporan	-	12 Laporan	100,00	12,00	25,00	12	12	100
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	32 Wilayah	-	-	-	2,00	6,25	0	0	0
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Laporan	-	-	-	12,00	75,00	4	4	100
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	5400 Ekor	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	28 Laporan	-	-	-	-	0,00	0 laporan	0 laporan	0
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah peningkatan SDM masyarakat dan petugas terhadap kesahatan masyarakat veteriner	7600 Ekor	-	-	-	-	0,00	2160	2160	100
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	29 Laporan	-	-	-	-	0,00	1	1	100
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	24 Orang	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	5410 Orang	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			-	-	-	-	0,00			0
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan			-	-	-	-	0,00			0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	100,00%	24,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100

	Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	5,09	100%	100,00	100,00	100,00	100%	100%	100
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	10010 Ha	17,98	2280 Ha	146,15	4.080,00	40,76	1560	1560	100
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	6410 Ha	-	2280 Ha	147,10	2.280,00	35,57	1550	1550	100
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	55 Ha	-	10 Ha	100,00	10,00	18,18	10	10	100
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	60 Ha	-	-	-	0,00	0	0	0	0
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2865 Ha	-	-	-	0,00	0	0	0	0
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (ha)	90 Ha	-	20 Ha	-	20,00	22,22	0	0	0
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan (Laporan)	12 Laporan	-	1 Laporan	-	1,00	8,33	0	0	0

	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	12 Laporan	-	-	-	0,00	0	0	0	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	69,6%	14,91	19%	100,00	19,00	14,91	19,0%	19,0%	100
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	849	45,13	220 kelompok	100,00	498,00	80,84	220	220	100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	157 Desa	100,00	157 Unit	100,00	157,00	100,00	157	157	100
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	849 Kelompok	25,91	220 Unit	100,00	283,00	33,33	220	220	100
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	157 Desa	-	157 Unit	100,00	157,00	100,00	157	157	100
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	24 Unit	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	300 Orang	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3 Dokumen	-	-	-	-	0,00	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN										
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	6%	-	2,50%	83,33	2,50	41,67	3%	3%	100
	Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	6%	-	2,50%	83,33	2,50	41,67	3%	3%	100
<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	1062.3 Ton	#VALUE!	810 Ton	80,42	810,00	#VALUE!	1.007,2	1.007,2	100

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	16 Dokumen	-	4 Dokumen	100,00	4,00	25,00	4	4	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	61%	16,08	34,20	112,50	44,01	72,15	30,4	30,4	100
	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%)	4,50%	-	1,10	48,89	1,10	24,44	2,25	2,25	100
<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	Jumlah kelembagaan kelompok perikanan yang meningkat kelasnya (Kelompok)	46 Kelompok	21,74	4 Kelompok	66,67	14,00	30,43	6	6	100
Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	30 Kelompok	33,33	5 Kelompok	100,00	15,00	50,00	5	5	100
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (Kelompok)	38 Kelompok	13,16		-	5,00	13,16	8	8	100
Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	38 Kelompok	2,63	8 Kelompok	100,00	9,00	23,68	8	8	100
<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	2005.5 Ton	94,99	1298,7 ton	89,98	3.203,70	159,75	1443,4	1443,4	100
	Jumlah peningkatan bibit ikan unggul yang dihasilkan (Ekor)	1.600.000 Ekor	77,23	927700 Ekor	77,31	#####	135,22	1200000	1200000	100
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Produksi Bibit ikan Unggul (ekor)	3000000 Ekor	41,19	927700 Ekor	77,31	#####	72,11	1.200.000	1.200.000	100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	616 Unit	16,07	120 Unit	125,00	219,00	35,55	96	96	100

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	24 Dokumen	16,67	4 Dokumen	100,00	8,00	33,33	4	4	100
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)	24%	31,96	0,12	100,00	7,79	32,46	12%	12%	100
<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota</i>	Luas kawasan perikanan lestari yang terawasi (Ha)	334,8 Ha	131,66	302,4 Ha	100,00	743,20	221,98	302,4	302,4	100
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	24 Dokumen	-	4 Dokumen	100,00	4,00	16,67	4	4	100
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (%)	100	30,10	57%	100,00	87,10	87,10	57	57	100
<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang terstandar	27 Produk	-	4 Produk	100,00	4,00	14,81	4	4	100
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	6 Unit	-	1 Unit	100,00	1,00	16,67	1	1	100
<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang diberikan fasilitas (Unit Usaha)	6 Unit	-	1 Unit	100,00	1,00	16,67	1	1	100

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	40 Pelaku	-	10 Pelaku Usaha	100,00	10,00	25,00	10	10	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	1	-	1,50%	150,00	1,15	115,00	1	1	100
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia	2 Unit	850,00	3 Unit	150,00	20,00	1000,00	2	2	100
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	6 Unit	166,67	1 Unit	100,00	11,00	183,33	1	1	100
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	4 Unit	-	1 Unit	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	12 Laporan	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Penyediaan Infrastruktur cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat	3 Unit	-	-	-	-	0,00	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Ketersediaan	88,46	96,16	85,78	97,69	85,78	96,97	87,81	87,81	100
	Skor PPH Konsumsi	89,38	99,69	89,60	100,98	89,60	100,25	88,73	88,73	100
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	9 Unit	-	0 Unit	-	-	0,00	0	0	0
	Jumlah kegiatan pendampingan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	8 Kegiatan	-	2 Kegiatan	100,00	2,00	25,00	2	2	100
	Jumlah dokumen pendukung stabilitas pasokan dan harga pangan yang tersedia	48 Dokumen	-	12 Dokumen	100,00	12,00	25,00	12	12	100

Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	39 Dokumen	-	13 Dokumen	100,00	13,00	33,33	13	13	100
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	4 Laporan	-	1 Laporan	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Pengembangan usaha pengelolaan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	6 Laporan	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Terpentanya perkembangannya harga pangan pokok Kabupaten (laporan)	12 Laporan	133,33	12 Laporan	100,00	28,00	233,33	12	12	100
	Jumlah Operasi Pasar dan Pasar Murah yang Terlaksana	5 Kali	100,00	40 Kali	800,00	54,00	1080,00	5	5	100
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok PUPM yang Dibina	8 Kelompok	50,00	4 Kelompok	100,00	8,00	100,00	4	4	100
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi neraca bahan makanan (NBM)	3 Dokumen	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten / Kota	12 Laporan	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	12 Laporan	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	12 Laporan	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Penyusunan prognosa neraca pangan wilayah Kabupaten / Kota	informasi prognosa Neraca pangan wilayah kabupaten / kota	36 Laporan	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Pemantauan harga dan pasokan pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	36 Laporan	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan	1653 Keluarga	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	-	-	-	-	0,00	0	0	0

Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	3 Dokumen	-	-	-	0,00	0	0	0	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersalurkan (ton)	288 Ton	-	8,914 Ton	24,09	8,91	3,10	37	37	100
	Jumlah Ketersediaan Pangan	63402,792 Ton	0,03	12857 Ton	99.281,85	12.874,80	20,31	12,950	12,950	100
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia	316 Ton	5,63	37,415 Ton	101,12	12.874,80	4074,30	37	37	100
Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	rencana kebutuhan pangan lokal yang tersedia	3 Dokumen	-	-	-	0,00	0	0	0	
Penyaluran cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	184 Ton	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	184 Ton	-	-	-	0,00	0	0	0	
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	184 Ton	-	-	-	0,00	0	0	0	
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Penentuan perumusan dan rekomendasi terkait harga minimum pangan pokok lokal	3 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1,00	33,33	-	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	12 Laporan	-	4 Laporan	-	4,00	33,33	0	0	0
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Direktori konsumsi pangan Kabupaten	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	-	4 Laporan	100,00	4,00	33,33	4	4	100

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	6 Laporan	-	-	-	0,00	0	0	0	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	80%	-	17%	85,00	17,00	21,25	20	20	100
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta dan Analisis Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3 Dokumen	-	-	-	-	0,00	0	0	0
	Jumlah Kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang terlaksana	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100
koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten / kota	12 Laporan	-	-	-	1,00	8,33	0	0	0
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	4 Dokumen	-	1 Dokumen	100,00	1,00	25,00	1	1	100
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	3 Dokumen	-	-	-	-	0,00	0	0	0
Penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten / kota	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Kabupaten / Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	0,00	0	0	0
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90%	111,11	100%	111,11	100,00	111,11	90%	90%	100
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang di uji mutu dan keamanannya	72 Dokumen	-	12 Dokumen	100,00	12,00	16,67	12	12	100

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	24	133,33	24 Kali	100,00	56,00	233,33	24	24	100
Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	0
Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Laporan	-		-	-	0,00	0	0	0
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	0
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	0
Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan	3 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	0
Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan	3 Dokumen	-		-	-	0,00	0	0	0

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dokumen	7 Dokumen	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	SEKRETAR IAT
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	SEKRETAR IAT
Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	SEKRETAR IAT
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	SEKRETAR IAT
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	SEKRETAR IAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12 Bulan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	SEKRETAR IAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	SEKRETAR IAT
Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah														
Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETAR IAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	118 Orang	118 Orang	132 Orang	137 Orang	137 Orang /bulan	137 Orang /bulan	100%	100%	130 Orang	137 Orang	137 Orang /bulan	SEKRETAR IAT
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		100%	100 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	SEKRETAR IAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	SEKRETAR IAT
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	SEKRETAR IAT
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	SEKRETAR IAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETAR IAT
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut (Paket)	260 stel	1 paket	1 paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		260 Stel	3 Paket	2 Paket	2 Paket	SEKRETAR IAT
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	15 Ok	5 Ok	15 OK	4 Orang	26 Orang	30 orang	30 Orang	5 Ok	31 OK	4 Orang	26 Orang	30 orang	SEKRETAR IAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETAR IAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	2 Paket	1 Paket	4 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 paket	2 Paket	SEKRETAR IAT

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	1 paket	1 paket	3 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket			3 paket	1 paket	1 Paket	SEKRETAR IAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	4 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	SEKRETAR IAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Bulan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	4 Bulan	12 Bulan	2 Dokumen	2 paket	2 paket	SEKRETAR IAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	100 Laporan	110 laporan	120 Laporan	130 Laporan	4 Bulan	12 Bulan	100 Laporan	110 laporan	120 Laporan	SEKRETAR IAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETAR IAT
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 Bulan	148 Unit	150 Unit	150 Unit	224 Unit	224 Unit	224 Unit			2 Unit	224 Unit	224 Unit	SEKRETAR IAT
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	72 Unit	85 Unit	1 Unit	8 Unit		276 Unit	72 Unit	85 Unit	SEKRETAR IAT

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	276 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit			37 Unit	20 Unit	20 Unit	SEKRETAR IAT
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	19 Unit	37 unit	2 unit	2 Unit	2 Unit			8 Unit	2 unit	2 Unit	SEKRETAR IAT
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	8 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit			8 Unit	3 Unit	1 Unit	SEKRETAR IAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Bulan		12%	12 Bulan	12 Bulan	SEKRETAR IAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Bulan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	SEKRETAR IAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Bulan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	SEKRETAR IAT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Bulan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	SEKRETAR IAT

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Bulan		12%	12 Bulan	12 Bulan	SEKRETAR IAT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	526 Unit	526 Unit	526 Unit	526 Unit	526 Unit	4 Bulan		526 Unit	526 Unit	526 Unit	SEKRETAR IAT
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit	SEKRETAR IAT
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Terpelihara (Unit)	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				2 Unit	1 Unit	SEKRETAR IAT
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	526 Unit	526 Unit	526 Unit	526 Unit	526 Unit	4 Bulan		526 Unit	526 Unit	526 Unit	SEKRETAR IAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	8 Unit	7 unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Bulan		8 Unit	7 unit	4 Unit	SEKRETAR IAT
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	1000 Kg/Ha	1,0%	1,0%	1%	1,05%	1,10%	1,15%	12,60		9,11%	0,60	1,05%	1,10%	Bidang Perkebunan
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0	0	0	5%	10%	10%	10%	10%			5,93	10%	10%	Bidang Peternakan
	Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	0	0	0	6%	6%	6%	6%	6%			6,00	6%	6%	Bidang Peternakan
	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	4,37 Ton/Ha	1%	1,0%	1%	1,05%	1,10%	1,15%	19,91	18,24%	1,36	1,05%	1,10%	1,10%	Bidang TPH

	Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	8,8 Ton/Ha	1%	1,0%	1%	1,05%	1,10%	1,15%	28,41	17,40%	1,26	1,05%	1,10%	Bidang TPH
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah luas peremajaan karet dan luas diversifikasi tanaman perkebunan	118 Ha	189 Ha	100 Ha	175 Ha	90 Ha	75 Ha	75 Ha			0 ha	90 Ha	75 Ha	Bidang Perkebunan
	Jumlah Sarana Produksi untuk Pemeliharaan Kebun Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			0 Paket	1 paket	1 paket	Bidang Perkebunan
	Jumlah Sarana Tanaman Pangan yang tersedia	0	0	0	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket			0 paket	14 Paket	14 Paket	Bidang TPH
	Jumlah Sarana Hortikultura yang tersedia	0	0	0	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket			0 Paket	10 Paket	10 Paket	Bidang TPH
	Jumlah Bibit atau Benih Padi BD dan BP yang bersertifikat	0	2.5 TON	2.5 TON	2 TON	2.5 Ton	7 TON	7 Ton			0 Ton	2.5 Ton	7 TON	UPT BBTPH
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Ton/Ha	0	0	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Bidang TPH
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		0	0	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 Laporan	4 laporan	4 laporan	Bidang Perkebunan
	Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Bidang Perkebunan
	Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		0	0	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Bidang TPH

Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)		0	0	2,5 Ton	2,5 Ton	7 Ton	7 Ton				2,5 Ton	7 Ton	BBTPH	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Laporan)	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang TPH	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura (Laporan)	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang TPH	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hasil Perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hasil Perkebunan (Laporan)	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang Perkebunan	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan (Laporan)	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang Perkebunan	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura (Laporan)	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang TPH	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Laporan)	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang TPH	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	0	0	0	0 ekor	200 ekor	220 ekor	240 ekor				115 Ekor	200 ekor	220 ekor	Bidang Peternakan

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		0	0	3 VUB	0	0	0			2 VUB	0	0	Bidang TPH	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0	0	0	0 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				4 dokumen	12 dokumen	Bidang Peternakan	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.				1 Dok.	1 Dok.	Bidang TPH	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pakan yang beredar	0	0	0	59 ton	64 ton	69 ton	74 ton			51 Ton	64 ton	69 ton	Bidang Peternakan	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	0	0	0	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Bidang Peternakan	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ternak yang Beredar	0	0	0	300 dosis	0	0	0			300 Dosis	0	0	Bidang Peternakan	
	Jumlah Bibit Ternak yang Beredar	0	0	0	219 Ekor	0	0	0				219 Ekor	0	0	Bidang Peternakan
	Jumlah kelahiran ternak di Sentra Kawasan dan Perbibitan Peternakan	0	0	0	1 Ekor	1 Ekor	2 Ekor	3 Ekor				1 Ekor	1 Ekor	2 Ekor	UPT Sentra
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	0	0	0	12 laporan	0	0	0			12 Laporan	0	0	Bidang Peternakan	

	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Laporan)	0	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 Ha	8 Ha	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	UPT Sentra
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penambahan populasi ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	0	0	0	0	7106 Ekor	7675 Ekor	8289 Ekor				7106 Ekor	7675 Ekor	Bidang Peternakan
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)	0	0	0	0 ekor	6.990 ekor	7.548 ekor	8.153 ekor				6.990 ekor	7.548 ekor	Bidang Peternakan
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	0	0	0 dosis	350 dosis	383 dosis	409 dosis				350 dosis	383 dosis	Bidang Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1.933.289Kg	8%	8%	4%	8%	8%	8%			0,04	8%	8%	Bidang Peternakan
			124	20%	20%	20%	20%	20%	20%	11%		0,19	20%	20%	Bidang P5
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	124	20	24	18 Pekerja an	18 Pekerja an	18 Pekerja an	18 Pekerja an			18 Pekerja an	18 Pekerja an	18 Pekerja an	Bidang P5
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0 Ha	0 Ha	0 Ha	400 Ha	400 Ha	400 Ha				400 Ha	400 Ha	Bidang P5
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit	Bidang P5

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit	Bidang P5
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen Hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit	Bidang P5
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit				4 Unit	4 Unit	Bidang P5
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit	Bidang P5
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit	Bidang P5
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit	Bidang P5
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil Perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit	Bidang P5

Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang P5
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang dikelola (Dokumen)	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang P5
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 (Dokumen)	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang P5
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang P5
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpenuhi	124	35 Unit	28 Unit	39 Unit	43 Unit	37 Unit	37 Unit	57 Unit	178 Pekerja an	237 Unit	43 Unit	37 Unit	Bidang P5
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	3 Unit	2 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4800 M3	7840 M3	4 Unit	1 Unit	1 Unit	Bidang P5
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	6 Unit	54 Unit	161 Unit	219 Unit	96 Unit	10 Unit	10 Unit	2641 M2	18000, 4 M2	209 Unit	96 Unit	10 Unit	Bidang P5

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1 Unit	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit	Bidang P5
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1 Unit	0	0	1 Unit	2 Unit	2 Unit				1 Unit	2 Unit	Bidang P5
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	8 Unit	0	0	0	5 Unit	8 Unit	8 Unit				5 Unit	8 Unit	Bidang P5
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	138 Unit	1 Unit	14 Unit	17 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	1 Unit	6 Unit	18 Unit	6 Unit	10 Unit	Bidang P5
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	6 Unit	2 Unit	6 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	423 M2	132 M2		1 Unit	2 Unit	Bidang P5
Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	1 unit	1 unit	1 unit				1 unit	1 unit	Puskesmas
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0	0	2 unit	1 unit	1 unit				2 unit	1 unit	Puskesmas
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0	0	1 unit	1 unit	1 Unit				1 unit	1 unit	Bidang Peternakan

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	140 Ekor	148 Ekor	156 Ekor	165 Ekor	0	0	0			115 Ekor	0	0	Bidang Peternakan
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	18	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	0	0			12 Laporan	0	0	Bidang Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	-	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	Bidang Peternakan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan surveilans pada Hewan	8 Kecamatan	0	0	0 kecamatan	8 kecamatan	8 kecamatan	8 kecamatan			0 Kecamatan	8 kecamatan	8 kecamatan	Bidang Peternakan
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0	0	0	12	12	12	12			12 Laporan	12	12	UPT Sentra
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	0	0	0	0 wilayah	2 wilayah	15 wilayah	15 wilayah				2 wilayah	15 wilayah	Bidang Peternakan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	4 laporan	12 laporan	0	-				12 laporan	0	Bidang Peternakan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	0	0	0	0 ekor	1.700 ekor	1.800 ekor	1.900 ekor				1.700 ekor	1.800 ekor	Bidang Peternakan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	100%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	6,50	24%	100%	#####	#####	Bidang Perkebunan
	Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	1,25	5,09	100%	100%	100%	100%	Bidang TPH
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	0	115 Ha	415 Ha	1560 Ha	4635	1640	1645		1800 Ha	2280 Ha	4635	1640	1640	Bidang TPH dan Perkebunan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	0	0	1550 Ha	3620 Ha	620 Ha	620 Ha			2280 Ha	3620 Ha	620 Ha	620 Ha	Bidang Perkebunan
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0	0	0	10 Ha	15 Ha	15 Ha	15 Ha			10 Ha	15 Ha	15 Ha	15 Ha	Bidang TPH

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	0	0	0	20 Ha	20 Ha	20 Ha				20 Ha	20 Ha	Bidang Perkebunan
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0	0	0	0 Ha	955 Ha	955 Ha	955 Ha				955 Ha	955 Ha	Bidang TPH
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (ha)	0	0	0	0	25 Ha	30 Ha	35 Ha			20 Ha	25 Ha	30 Ha	Bidang Perkebunan
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Bidang Perkebunan
	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0	0	0	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang TPH
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	220	19,00%	19,0%	19,0%	4,2%	4,2%	4,2%	100%	100%	19%	4,2%	4,2%	Bidang P5

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	220	220	220	220	63	63	63	8,00	#####	220 kelompok	63	63	Bidang P5
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	157	157	157	157	157	157			157 Unit	157	157	Bidang P5
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	220	220	220	63	63	63	8 Kelompok		220 Unit	63	63	Bidang P5
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	157	157	157	157	157	157	87 Orang		157 Unit	157	157	Bidang P5
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	0	0	0	8 Unit	8 Unit	8 Unit				8 Unit	8 Unit	Bidang P5
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	0	0	100 Orang	100 Orang	100 Orang				100 Orang	100 Orang	Bidang P5
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang P5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	952,09	1%	2%	3%	4%	5%	6%			2,50%	4%	5%	Bidang Perikanan

Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (Kelompok)	0	0	6 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	5 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	Bidang Perikanan	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	0	0	6 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	-	1 Kegiatan	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	Bidang Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	884,92 Ton	1068.6 Ton	1256.0 Ton	1443.4 Ton	1630.7 Ton	1818.1 Ton	2005.5 Ton	929 Ton	976 Ton	1298,7 ton	1630.7 Ton	1818.1 Ton	Bidang Perikanan	
	Jumlah peningkatan bibit ikan unggul yang dihasilkan (Ekor)	0	800.000 Ekor	1.000.000 Ekor	1.200.000 Ekor	1.400.000 Ekor	1.500.000 Ekor	1.600.000 Ekor	483344 Ekor	752400 Ekor	927700 Ekor	1.400.000 Ekor	1.500.000 Ekor	BBIL	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Produksi Bibit ikan Unggul (ekor)	0	800.000 Ekor	1.000.000 Ekor	1.200.000 Ekor	-	-	-	483344 Ekor	752400 Ekor	927700 Ekor	-	-	BBIL	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	24 Unit	96 Unit	96 Unit	140 Unit	120 Unit	140 Unit		99 Kelompok	120 Unit	140 Unit	120 Unit	Bidang Perikanan dan BBIL	

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Bidang Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)	0	4%	8%	12%	16%	20%	24%	3,67	4%	0,12	16%	20%	Bidang Perikanan	
<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota</i>	Luas kawasan perikanan lestari yang terawasi (Ha)	270 Ha	280,8 Ha	291,6 Ha	302,4 Ha	313,2 Ha	324 Ha	334,8 Ha	160 Ha	280,8 Ha	302,4 Ha	313,2 Ha	324 Ha	Bidang Perikanan	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Bidang Perikanan	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (%)	0	29%	43%	57%	71	86	100	13%	17,10%	57%	71	86	Bidang Perikanan	
<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang terstandar	0	2 Produk	3 Produk	4 Produk	5	6	7	4 Produk	5	6	6	Bidang Perikanan		

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1	1			1 Unit	1	1	Bidang Perikanan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang diberikan fasilitas (Unit Usaha)	1	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit	1	1	1			1 Unit	1	1	Bidang Perikanan
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	0	10 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	10	10			10 Pelaku Usaha	10 Pelaku usaha	10	Bidang Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	-	0	0	1	1	1	1			1,50%	1	1	Bidang Ketapang
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia	0	3	2	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8 Unit	9 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	Bidang Ketapang

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	25 Unit	3 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	8 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	Bidang Ketapang
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	0	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit	1 Unit	Bidang Ketapang
Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	Bidang Ketapang
Penyediaan Infrastruktur cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat	0,00	0	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit					1 Unit	1 Unit	Bidang Ketapang
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Ketersediaan	86	87,4	87,59	87,81	88,03	88,24	88,46				85,75	88,03	88,24	Bidang Ketapang
	Skor PPH Konsumsi	87	88,3	88,51	88,73	88,94	89,16	89,38				89,60	88,94	89,16	Bidang Ketapang
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	-	0	0		3 Unit	3 Unit	3 Unit				0 Dokumen	3 Unit	3 Unit	Bidang Ketapang
	Jumlah kegiatan pendampingan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	-	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Bidang Ketapang

	Jumlah dokumen pendukung stabilitas pasokan dan harga pangan yang tersedia	-	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Bidang Ketapang
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	65	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen			13 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Bidang Ketapang
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Bidang Ketapang
Pengembangan usaha pengelolaan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0	0	0	0	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan	Bidang Ketapang
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan terpantauanya perkembangan harga pangan pokok Kabupaten (laporan)	12	4	12	12 Laporan	0	0	0	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0	Bidang Ketapang
	Jumlah Operasi Pasar dan Pasar Murah yang Terlaksana	25	1	5	5 Kali	0	0	0	-	5 Kegiatan	40 Kali	0	0	Bidang Ketapang
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok PUPM yang Dibina	20	0	4	4 Kelompok	0	0	0	4 Kelompok		4 Kelompok	0	0	Bidang Ketapang
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi neraca bahan makanan (NBM)	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang

Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten / Kota	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang Ketapang
Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang Ketapang
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang Ketapang
Penyusunan prognosa neraca pangan wilayah Kabupaten / Kota	informasi prognosa Neraca pangan wilayah kabupaten / kota	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	Bidang Ketapang
Pemantauan harga dan pasokan pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	Bidang Ketapang
Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan	0	0	0	0	551 Keluarga	551 Keluarga	551 Keluarga				551 Keluarga	551 Keluarga	Bidang Ketapang
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit	Bidang Ketapang
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang

Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	Bidang Ketapang
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersalurkan (ton)	-	30 Ton	65 Ton	37 Ton	52 Ton	52 Ton	52 Ton			8,914 Ton	52 Ton	52 Ton	Bidang Ketapang
	Jumlah Ketersediaan Pangan	-	10.841 Ton	11383	12.950 Ton	13598	14277	14991	7,8 Ton	10 Ton	12857 Ton	13598	14277	Bidang Ketapang
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia	60 Ton	30 Ton	65 Ton	37 Ton	80 Ton	52 Ton	52 Ton	7,8 Ton	10 Ton	37,415 Ton	80 Ton	52 Ton	Bidang Ketapang
Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	rencana kebutuhan pangan lokal yang tersedia	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Penyaluran cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	0	0	0	0	80 Ton	52 Ton	52 Ton				80 Ton	52 Ton	Bidang Ketapang
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0	0	0	0	80 Ton	52 Ton	52 Ton				80 Ton	52 Ton	Bidang Ketapang
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	0	0	0	0	80 Ton	52 Ton	52 Ton				80 Ton	52 Ton	Bidang Ketapang

Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Penentuan perumusan dan rekomendasi terkait harga minimum pangan pokok lokal	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	0	0	0	0	4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 Laporan	4 laporan	4 laporan	Bidang Ketapang
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Direktori konsumsi pangan Kabupaten	-	0		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Bidang Ketapang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0	0	0	0	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan	Bidang Ketapang
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	-	0	0	20%	20%	20%	20%			17%	20%	20%	Bidang Ketapang

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	-	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Bidang Ketapang
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta dan Analisis Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
	Jumlah Kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang terlaksana	-	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten / kota	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang Ketapang
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang

Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten / kota	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Kabupaten / Kota	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90%	90	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%	Bidang Ketapang
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang di uji mutu dan keamanannya		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Bidang Ketapang
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	60	8	24	24 Kali	0	0	0	8,00	24 PSAT	24 Kali	0	0	Bidang Ketapang
Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang

Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	Bidang Ketapang
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang
Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Ketapang

Dari data-data pada Tabel TC. 29 di atas, dapat diuraikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renstra Tahun 2021 - 2026 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Capaian Renja Tahun 2024 sd Triwulan II adalah sebagai berikut:

- a. Dari 14 program yang dilaksanakan dengan total 24 indikator terdapat 3 indikator yang predikat capaiannya sangat tinggi, ada 1 Indikator yang capaian predikatnya tinggi dan sedang dan 2 indikator yang predikat capaiannya rendah, serta ada 13 Indikator yang capaiannya sangat rendah dibawah angka 50%. Namun ada 4 Indikator yang capaiannya melebihi angka 100% .

Dua Indikator yang predikatnya sangat tinggi yaitu

- Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan dengan capaian 100%, capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 87,00% pada Tahun pertengahan Renstra SKPD.
- Indikator ketiga yang predikat capaiannya sangat tinggi adalah persentase luasan pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura, yang artinya pengendalian dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai laporan yang diterima.

Lima Indikator yang predikat capaian melebihi 100% sd TR II

Tahun 2024 adalah :

- a. Persentase penanganan desa rentan pangan dengan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 199,86%
- b. Persentase peningkatan produktifitas Tanaman Pangan dengan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 260,00%. Namun capaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 yaitu tahun pertengahan Renstra adalah sebesar 1% dari target akhir Renstra Tahun 2026 adalah sebesar 1.15%, sehingga masih ada 0,15% target yang harus dicapai sampai dengan akhir Renstra 2026.
- c. Persentase peningkatan produktifitas Hortikultura dengan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 710,48%. Namun capaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 yaitu tahun pertengahan Renstra adalah sebesar 1% dari target akhir Renstra Tahun 2026 adalah sebesar 1.15%, sehingga masih ada 0,15% target yang harus dicapai sampai dengan akhir Renstra 2026.
- d. Persentase peningkatan produksi peternakan dengan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 930,25%. Namun capaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 yaitu tahun pertengahan Renstra adalah sebesar 3.82% dari target akhir Renstra Tahun 2026 adalah sebesar 44%, sehingga masih ada 40,18% target

yang harus dicapai sampai dengan akhir Renstra 2026.

- e. Indek Kepuasan Masyarakat dengan capaian 108% yang berarti melebihi target dan capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 85,75% pada Tahun pertengahan Renstra SKPD.

Capaian Indikator Kinerja yang predikatnya Tinggi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah Persentase pelayanan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner yaitu sebesar 80% dengan capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 100%.

Capaian Indikator kinerja program yang predikatnya sedang sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi dengan capaian sebesar 75,4% dan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 adalah 1% dengan target akhir Renstra adalah 1%.

Capaian selanjutnya adalah capaian kinerja dengan predikat rendah ada 3 indikator yaitu :

- a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 62,5%, dan target capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun Renstra 2026 adalah 6% dengan capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 2.5% masih tersisa 3.5% yang harus dicapai dari Tahun 2024 sd Tahun 2026.

- b. Persentase peningkatan produktifitas perikanan tangkap dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 62,5%, dan target capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun Renstra 2026 adalah 6% dengan capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 2.5% masih tersisa 3.5% yang harus dicapai dari Tahun 2024 sd Tahun 2026.
- c. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 58,86%, dan target capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun Renstra 2026 adalah 61% dengan capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 34,2% masih tersisa 26,8% yang harus dicapai dari Tahun 2024 sd Tahun 2026.

Capaian selanjutnya adalah capaian kinerja dengan predikat sangat rendah ada 12 indikator yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP SKPD) dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 0%
- b. Skor PPH Konsumsi dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 14,4%
- c. Skor PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 34,17%
- d. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dengan capaian

kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 22,8%

- e. Persentase peningkatan produktifitas perikanan budidaya dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 16,67%
- f. Persentase peningkatan Kawasan perikanan lestari dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 37,5%
- g. Persentase peningkatan produktifitas perkebunan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 23,38%
- h. Persentase peningkatan populasi ternak dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 32,6%
- i. Persentase pelayanan Inseminasi Buatan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 30,5%
- j. Persentase peningkatan prasarana pertanian dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 22,5%
- k. Persentase luas wilayah yang terdampak bencana perkebunan yang dapat ditanggulangi dan dikendalikan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 0%
- l. Persentase peningkatan kelas kelompok tani dengan capaian

kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah 14,21%

- b. Dari 31 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 terdapat total 40 indikator *ouput* (keluaran), dengan range capaian antara 90% - 100% atau berpredikat sangat tinggi berjumlah 2 indikator. Indikator dengan predikat capaian tinggi berjumlah 0 Indikator. Indikator dengan predikat capaian Sedang berjumlah 2 Indikator Dengan predikat capaian rendah ada 2 indikator kegiatan, dan Indikator dengan predikat capaian sangat rendah berjumlah 2 Indikator.

Indikator kinerja sampai dengan Triwulan II TA. 2024 dengan predikat capaian kinerja sangat tinggi adalah (1) Jumlah produksi perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 90,51%, dengan target akhir Renstra sebesar 924,7 Ton dan Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 129,7 Ton. (2) Jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang terstandar dengan capaian sebesar 100%, dengan target akhir Renstra sebesar 7 produk dan Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 4 Ton.

Indikator kinerja sampai dengan Triwulan II TA. 2024 dengan predikat capaian kinerja sedang sebanyak 2 Indikator yaitu (1) Persentase layanan administrasi keuangan perangkat Daerah

dengan capaian sebesar 75%, dengan target akhir Renstra sebesar 100% dan Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. (2) Jumlah peningkatan bibit ikan unggul yang dihasilkan dengan capaian sebesar 72,45%, dengan target akhir Renstra sebesar 160.000 ekor dan Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 92.770 ekor, sehingga sisa target yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun Renstra adalah 67.230 Ekor.

Indikator kinerja sampai dengan Triwulan II TA. 2024 dengan predikat capaian kinerja Rendah sebanyak 2 Indikator yaitu (1) Persentase Persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang baik dengan capaian sebesar 55%, dengan target akhir Renstra sebesar 100% dan Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. (2) Jumlah sarana Tanaman pangan yang tersedia dengan capaian sebesar 57,14%, dengan target akhir Renstra sebesar 56 Paket dan Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 0 paket.

Indikator kinerja sampai dengan Triwulan II TA. 2024 dengan predikat capaian kinerja Sangat Rendah sebanyak 34 Indikator yaitu (1) Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik dengan capaian sebesar 50%

(2) Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang baik dengan capaian sebesar 50%

(3) Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 50%.

(4) Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat

daerah yang baik dengan capaian sebesar 50%

(5) Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah yang baik dengan capaian sebesar 50%.

(6) Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia dengan capaian sebesar 50%

(7) Jumlah keseimbangan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan dengan capaian sebesar 0%.

(8) Jumlah kegiatan pendampingan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal dengan capaian sebesar 0%.

(9) Jumlah Dokumen pendukung stabilitas pasokan dan harga pangan yang tersedia dengan capaian sebesar 0%.

(10) Jumlah Dokumen pangan pemerintah yang tersalurkan dengan capaian sebesar 3,46%.

(11) Jumlah ketersediaan pangan dengan capaian sebesar 0%.

(12) Jumlah dokumen penentuan perumusan dan rekomendasi terkait harga minimum pangan pokok lokal dengan capaian sebesar 0%.

(13) Jumlah direktori konsumsi pangan kabupaten dengan capaian sebesar 0%.

(14) Peta dan analisis ketahanan dan ketersediaan pangan yang dimutakhirkan dengan capaian sebesar 0%.

(15) Jumlah kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang terlaksana dengan capaian sebesar 0%.

(16) Jumlah kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang

terlaksana dengan capaian sebesar 0%.

(17) Jumlah dokumen pangan segar asal tumbuhan yang di uji mutu dan keamanannya dengan capaian sebesar 50%.

(18) Jumlah produksi perikanan tangkap dengan capaian sebesar 42,52%.

(19) Jumlah kelembagaan kelompok perikanan yang meningkat kelasnya dengan capaian sebesar 50%.

(20) Luas kawasan perikanan lestari yang terawasi dengan capaian sebesar 37,99%.

(21) Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang diberikan fasilitas (Unit usaha) dengan capaian sebesar 0%.

(22) Jumlah luas penangkaran karet dan luas diversifikasi tanaman perkebunan dengan capaian sebesar 0%.

(23) Jumlah sarana produksi untuk pemeliharaan kebun daerah dengan capaian sebesar 0%.

(24) Jumlah sarana hortikultura yang tersedia dengan capaian sebesar 0%.

(25) Jumlah bibit atau benih padi BD dan BP yang bersertifikat dengan capaian sebesar 30%.

(26) Jumlah kelahiran ternak hasil IB dengan capaian sebesar 20%.

(27) Jumlah kelahiran ternak di sentra kawasan dan pelayanan peternakan dengan capaian sebesar 0%.

(28) Jumlah penambahan populasi ternak yang sumbernya dari

daerah kabupaten/kota lain dengan capaian sebesar 0,79%.

(29) Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan dengan capaian sebesar 0%.

(30) Jumlah prasarana pertanian yang terpenuhi dengan capaian sebesar 0%.

(31) Jumlah peningkatan SDM Masyarakat dan petugas terhadap kesehatan masyarakat veteriner dengan capaian sebesar 38%.

(32) Jumlah luasan pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan dengan capaian sebesar 1,41%.

(33) Jumlah peningkatan kelas kelompok tani dengan capaian sebesar 0%.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2023 tersaji pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	654.655.600	651.918.599	99,58	2.737.001
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	654.655.600	651.918.599	99,58	2.737.001
1.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	345.856.000	344.580.799	99,63	1.275.201
2.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	308.799.600	307.337.800	99,53	1.461.800
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.376.588.900	1.312.136.161	95,32	64.452.739
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	627.734.500	609.887.000	97,16	17.847.500
3.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	73.187.800	72.821.800	99,5	366.000
4.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	87.322.100	87.108.600	99,76	213.500
5.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	420.340.300	403.350.300	95,96	16.990.000
6.	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	46.884.300	46.606.300	99,41	278.000
3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	481.358.100	443.193.930	92,07	38.164.170
7.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	481.358.100	443.193.930	92,07	38.164.170
4	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	64.446.600	64.442.600	99,99	4.000
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	64.446.600	64.442.600	99,99	4.000

5	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	203.049.700	194.612.631	95,84	8.437.069
9.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	23.648.000	23.457.000	99,19	191.000
10.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	179.401.700	171.155.631	95,4	8.246.069
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	183.944.000	168.742.900	91,74	15.201.100
6	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	135.382.800	122.359.300	90,38	13.023.500
11.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	135.382.800	122.359.300	90,38	13.023.500
7	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.561.200	46.383.600	95,52	2.177.600
12.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.561.200	46.383.600	95,52	2.177.600
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	32.699.400	32.477.000	99,32	222.400
8	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	32.699.400	32.477.000	99,32	222.400
13.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	32.699.400	32.477.000	99,32	222.400
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.949.400	5.640.000	40,43	8.309.400
9	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	13.949.400	5.640.000	40,43	8.309.400
14.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	13.949.400	5.640.000	40,43	8.309.400
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	29.176.039.900	27.562.001.386	94,47	1.614.038.514
10	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	286.445.500	263.326.238	91,93	23.119.262

15.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	80.979.500	72.259.500	89,23	8.720.000
16.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	205.466.000	191.066.738	92,99	14.399.262
11	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	28.889.594.400	27.298.675.148	94,49	1.590.919.252
17.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.163.349.800	1.053.992.256	90,6	109.357.544
18.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.662.331.600	26.200.838.744	94,72	1.461.492.856
19.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.913.000	43.844.148	68,6	20.068.852
7.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	296.866.200	283.987.850	95,66	12.878.350
12	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	296.866.200	283.987.850	95,66	12.878.350
20.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	296.866.200	283.987.850	95,66	12.878.350
8.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	681.708.900	646.069.714	94,77	35.639.186
13	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	353.248.700	336.270.714	95,19	16.977.986
21.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	353.248.700	336.270.714	95,19	16.977.986
14	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	328.460.200	309.799.000	94,32	18.661.200
22.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	328.460.200	309.799.000	94,32	18.661.200
9.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.455.768.846	26.235.055.838	83,4	5.220.713.008

15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	649.056.100	566.850.068	87,33	82.206.032
23.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.868.700	494.958.194	87,62	69.910.506
24	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.187.400	71.891.874	85,4	12.295.526
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.710.689.546	17.466.327.618	84,33	3.244.361.928
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.474.293.546	17.245.135.064	84,23	3.229.158.482
31.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236.396.000	221.192.554	93,57	15.203.446
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.201.975.000	904.395.000	75,24	297.580.000
26	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	433.975.000	377.395.000	86,96	56.580.000
27	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19.500.000	97,5	500.000
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.401.102.300	2.079.636.227	86,61	321.466.073
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.502.900	52.116.500	86,14	8.386.400
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.448.132.400	1.171.926.500	80,93	276.205.900
30	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.804.000	77.700.300	72,75	29.103.700
31	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.184.000	7.560.000	74,23	2.624.000
32	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	775.479.000	770.332.927	99,34	5.146.073
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.353.904.500	4.238.359.476	79,16	1.115.545.024

33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.353.904.500	4.238.359.476	79,16	1.115.545.024
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.395.000	385.300.027	84,61	70.094.973
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.995.000	14.518.200	96,82	476.800
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440.400.000	370.781.827	84,19	69.618.173
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.646.400	594.187.422	86,91	89.458.978
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	634.821.700	553.039.922	87,12	81.781.778
37	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000			100.000.000
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.824.700	41.147.500	84,28	7.677.200
10.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	72.001.854.774	63.621.566.996	88,36	8.380.287.778
22	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	62.299.069.974	55.239.263.217	88,67	7.059.806.757
39	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	62.299.069.974	55.239.263.217	88,67	7.059.806.757
23	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5.842.584.900	5.321.775.931	91,09	520.808.969
40	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	5.264.089.300	4.967.799.610	94,37	296.289.690
41	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	578.495.600	353.976.321	61,19	224.519.279
42	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	5.160.538.600			5.160.538.600
24	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.163.200	149.378.875	76,15	46.784.325

43	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	196.163.200	149.378.875	76,15	46.784.325
25	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.664.036.700	2.911.148.973	79,45	752.887.727
44	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	2.373.616.400	1.818.182.073	76,6	555.434.327
45	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.290.420.300	1.092.966.900	84,7	197.453.400
11.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	51.432.911.810	48.498.460.454	94,29	2.934.451.356
26	Pembangunan Prasarana Pertanian	48.941.634.600	46.597.730.684	95,21	2.343.903.916
46	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.214.853.500	1.199.676.737	98,75	15.176.763
47	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	786.165.300	765.248.200	97,34	20.917.100
48	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	44.256.698.200	42.187.791.056	95,33	2.068.907.144
49	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.683.917.600	2.445.014.691	91,1	238.902.909
27	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.491.277.210	1.900.729.770	76,3	590.547.440
50	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2.491.277.210	1.900.729.770	76,3	590.547.440
12.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.066.689.600	942.628.000	88,37	124.061.600
28	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	612.117.200	496.778.200	81,16	115.339.000
51	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	397.091.800	300.096.000	75,57	96.995.800
52	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	215.025.400	196.682.200	91,47	18.343.200

53	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	415.217.800			415.217.800
29	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	102.989.200	99.359.500	96,48	3.629.700
54	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	102.989.200	99.359.500	96,48	3.629.700
30	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	351.583.200	346.490.300	98,55	5.092.900
55	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	351.583.200	346.490.300	98,55	5.092.900
13.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.926.059.550	4.632.799.002	94,05	293.260.548
31	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	4.926.059.550	4.632.799.002	94,05	293.260.548
56	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4.926.059.550	4.632.799.002	94,05	293.260.548
14.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.762.045.900	7.634.871.548	98,36	127.174.352
32	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7.762.045.900	7.634.871.548	98,36	127.174.352
57	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	251.867.000	247.849.600	98,4	4.017.400
58	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	4.866.928.500	4.864.891.700	99,96	2.036.800
59	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.643.250.400	2.522.130.248	95,42	121.120.152
	Jumlah Anggaran dari seluruh Program	201.061.782.780	182.228.355.448		

Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Balangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 201.061.782.780,- (termasuk

perubahan). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 182.228.355.448,- (90,63%) dengan capaian kinerja 92,65%. Meskipun rata-rata serapan anggaran per program di atas 83-99%, tetapi masih ada 1 Program yang capaian serapan anggaran hanya 40,43% Yaitu Program Budidaya Perikanan Tangkap dibanding Tahun 2022 ada 2 program di bawah 80% yaitu 62,47% yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner, dan program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian capaian serapan anggaran 67.03%. Dan untuk Kegiatan serta sub kegiatan yang capaian kinerjanya di bawah 60% yaitu kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota capaian kinerja sebesar 40,43% dan Sub kegiatan yang capaiannya di bawah 60% yaitu sebesar 40,43% yaitu penyediaan data dan informasi sumber daya ikan. Walaupun jumlah nominal pagu keuangannya sedikit sebesar 13.949.400 namun jika direalisasikan hanya 5.640.000 maka persentase capaian realisasi keuangan pun juga sangat rendah.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan salah satu OPD dibawah Pemerintah Kabupaten Balangan yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada petani, peternak dan Nelayan di Kabupaten Balangan. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsung pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Analisis terhadap kinerja pelayanan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021 - 2026, dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 dengan Mewujudkan misi ke II Kepala Daerah yakni Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam mewujudkan misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan mempunyai sasaran yaitu : Meningkatnya Produksi Pertanian, Meningkatnya Produksi Perikanan dan Meningkatnya Skor PPH Konsumsi dan skor PPH Ketersediaan. Dimana untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut ada indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yaitu : Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian, Persentase Peningkatan Produksi Sektor perikanan dan Persentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi dan Persentase Peningkatan PPH Ketersediaan.

Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2023, dengan menyandingkan data realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel 2.3.

berikut.

Tabel 2.3. Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Ket	Capaian 2022
Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi sektor tanaman pangan dan hortikultura	1%	0,86%	86%	Tinggi	58,56%
	Persentase peningkatan produksi sektor Peternakan	4%	3,76%	94%	Sangat Tinggi	86,75
	Persentase peningkatan produksi sektor perkebunan	1%	0,87%	87%	Tinggi	78,66%
	Persentase peningkatan produksi sektor perikanan	33,40%	33,50%	100,29%	Sangat Tinggi	90,22%
Meningkatnya Penguatan Nilai Tambah Hilirisasi Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan hilirisasi sektor perikanan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%
Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase Peningkatan Skor PPH Ketersediaan	1,75	1,71	97,71%	Sangat Tinggi	96,66%
	Persentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi	1,75	1,77	101,14%	Sangat Tinggi	100,66%
Rata – Rata Capaian				95,16		87,35%

Dari Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada tahun 2023

yaitu indikator kinerja :

- a. Persentase Peningkatan Produksi sektor tanaman pangan dan hortikultura tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan atau hanya terealisasi sebesar 86,00%. Namun meningkat sebesar 27,44% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang capaiannya hanya sekitar 58,56%,
- b. Persentase Peningkatan Produksi sektor Peternakan, pada Tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja di banding tahun 2022 yaitu 94% dari 86,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi sektor Peternakan meningkat sebesar 7,26%. Dimana peningkatan tersebut masih belum mencapai target yang diinginkan pada tahun 2023.
- c. Persentase peningkatan produksi sector perkebunan juga mengalami peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 87%, di bandingkan capaian kinerja pada Tahun 2022 hanya sebesar 78,66%. Peningkatan Tahun 2023 sebesar 8,34% juga masih belum mencapai target yang diharapkan.
- d. Persentase peningkatan produksi sector perikanan pada Tahun 2023 sudah melampaui target yang di harapkan sebesar 100,29% dan mengalami peningkatan dibanding Tahun 2023 sebesar 10.07%.
- e. Indikator capaian Kinerja selanjutnya adalah persentase pertumbuhan hilirisasi sector perikanan pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar 100%, dan target ini tercapai.
- f. Persentase Peningkatan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2023 dengan capaian 97,71%, walaupun masih belum mencapai target yang ditentukan namun sudah mengalami kenaikan sebesar 1,05% dibanding Tahun 2022 dengan nilai capaian sebesar 96,63%.

- g. Persentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi pada Tahun 2023 sudah melebihi target yang ditentukan dengan capaian sebesar 101,14%. Capaian tersebut sudah melebihi dari capaian Tahun 2022 sebesar 99% dengan kenaikan sebesar 0,48%.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian tersebut sangat baik berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian pada tahun 2023.

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

1. Memberikan fasilitasi sarana produksi untuk sektor pertanian dan perikanan, yaitu pemberian Benih/bibit unggul, Pupuk dan Obat-obatan pertanian, obat-obatan untuk vaksinasi ternak, dan pengadaan alat dan mesin pertanian.
2. Memberikan Fasilitasi Prasarana pertanian dengan pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, Pembangunan Irigasi, Pembangunan UPPB dan Pondok pertemuan walaupun secara tidak langsung dapat meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian.
3. Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi;
4. Mengembangkan diversifikasi usaha perikanan dan pemasaran;
5. Optimalisasi teknologi dan sumber daya pertanian dan perikanan;
6. Penguatan kelembagaan petani dengan melakukan revitalisasi kelompok-kelompok tani yang baru sesuai kebutuhan;

7. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
8. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
9. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Secara khusus, pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian baik tercapai sesuai/melebihi target maupun kurang dari target dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak tercapainya target indikator kinerja Meningkatnya produksi sektor Tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan terutama 3 sektor yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, sedangkan untuk sektor perikanan melampaui dari target yang ditetapkan dan melebihi dari tahun sebelumnya. Capaian peningkatan produksi pada 4 sektor tersebut yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah sector tanaman pangan dan hortikultura sebesar 27,44%. Namun peningkatan tersebut masih belum mampu untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Beberapa hal yang masih menghambat dalam pencapaian peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah antara lain : luas baku sawah yang jauh menurun, tata Kelola air yang masih belum memadai sehingga optimalisasi lahan masih belum maksimal dalam rangka peningkatan produksi. Selanjutnya capaian indikator peningkatan produksi yang kedua adalah peningkatan produksi perikanan sebesar 10,07 dan sudah melampaui dari target capaian yang ditetapkan. Hal tersebut di dukung oleh banyaknya sarana dan prasarana untuk perikanan budidaya yang difasilitasi untuk pokdakan se Kabupaten Balangan baik berupa Keramba, Biflok, kolam ikan maupun benih dan pakan

ikan. Capaian yang ketiga adalah peningkatan produksi sector perkebunan sebesar 8,34%. Namun kenaikan capaian tersebut disbanding Tahun 2022 masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, hal tersebut dikarenakan masih adanya penyakit Gugur Daun pada tanaman karet yang mempengaruhi capaian target namun sampai dengan saat ini alokasi untuk pengendalian GDK sudah banyak di realisasikan, sehingga harapan ke depan pada tahun 2024 ini Capaian kinerja peningkatan produksi perkebunan akan tercapai. Selanjutnya peningkatan target kinerja produksi yang paling kecil di capai oleh peternakan hanya sebesar 7,26% dan capaian target kinerjanya pun masih belum di capai. Hal tersebut masih dipengaruhi oleh kurangnya bantuan yang diberikan untuk masyarakat kelompok tani penerima karena kelengkapan dan syarat usulan yang masih tidak sesuai verifikasi.

- b. Sasaran strategis meningkatnya penguatan nilai tambah hilirisasi sector perikanan sudah tercapai 100% pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, dikarenakan target ingin di capai hanya 1 unit usaha yang terdaftar. Hal tersebut akan dengan mudah di capai setiap tahunnya dengan fasilitasi anggaran yang sudah sangat cukup.
- c. Sasaran strategis Meningkatnya skor PPh Ketersediaan dan skor PPh Konsumsi meningkat pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022. Dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi B2SA sudah cukup. Oleh karena itu skor pph ketersediaan dan konsumsi meningkat.

Selanjutnya, selain realisasi dari target Indikator Kinerja Utama, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja penyelenggaraan bidang

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Kinerja						Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			70	71 (BB)	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	69.96	69.96	73 (BB)	74 (BB)	
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pelaksanaan administrasi umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
II	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)			10.00%	12.00%	14.00%	16.00%	18.00%	20.00%	12.00	9.11	16.00%	18.00%	
III	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)			15.00%	16.00%	17.00%	18.00%	19.00%	20.00%	20.00	18.24	18.00%	19.00%	
IV	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura			15.00%	16.00%	17.00%	18.00%	19.00%	20.00%	28.41	17.40	18.00%	19.00%	
V	Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH			50%	51.00%	52.00%	53.00%	54.00%	55.00%	0.50	33.77	53.00%	54.00%	
VI	Persentase Peningkatan Produksi Daging			3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	18.31	3.49	3.50%	3.50%	
VII	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB			6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	16.43	3.40	6.00%	6.00%	
VIII	Persentase Peningkatan sarana Pertanian			25%	25.0%	25%	25%	25%	25%	0.50	35.50	25%	25%	

	Jumlah Peningkatan Luas Indeks Pertanaman			200 Ha	225 Ha	250 Ha	275 Ha	300 Ha	325 Ha	0	100	275 Ha	300 Ha	
	Jumlah Peningkatan Penggunaan Pupuk Berimbang Pada Indeks Pertanaman			125 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha	0	260	125 Ha	125 Ha	
	Jumlah Sarana Pertanian Yang Diserahkan Kepada Masyarakat			148 Paket	148	148	148	148	148	14	152	148	148	
	Jumlah Demplot Sarana Penyuluhan dalam budidaya tanaman Hortikultura					4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0	2	4 unit	4 unit	
	Jumlah Benih/Bibit dan Sarana Produksi Hortikultura			9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9	21	9 Paket	9 Paket	
	Jumlah UPPB dan Kel Tani penerima bantuan Sarana Pertanian			27	82	82	82	82	82	10	82	82	82	
	Jumlah Luas Rehabilitasi dan Penanaman Tanaman Perkebunan			189	100	175	175	125	125	173	141	175	125	
	Jumlah Chip Porang Kualitas Ekspor			1 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1	0	1 Ton	1 Ton	
	Jumlah benih kelas tinggi yang dihasilkan				2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	1500	2133	2500 Kg	2500 Kg	
	Jumlah Pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura (Pasca Panen)			70	140	210	280	350	420	70	140	280	350	
	Jumlah Pameran Produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura			5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	1	5	5 kali	5 kali	
	Jumlah kontes buah Durian dan Buah langka lainnya			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1	0	1 kali	1 kali	
	Jumlah Luas Penangkaran Tanaman Pangan dan Hortikultura			50 Hektare	50 Hektare	50 Hektare	50 Hektare	50 Hektare	50 Hektare	0	40	50 Hektare	50 Hektare	
	Jumlah Kebun Koleksi dan Entrys yang terpelihara			12 Ha	12 Ha	12 Ha	12 Ha	12 Ha	12 Ha	12	12	12 Ha	12 Ha	
	Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti			0		10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	0	4	10 kegiatan	10 kegiatan	
	Jumlah Pelayanan IB di 4 Kecamatan (Halong, Juai, Paringin, dan Paringin Selatan)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Penyebaran Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat			4517	200900	200900	200900	200900	200900	4517	7150	200900	200900	
IX	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian			20%	20.0%	20%	20.0%	20%	20.0%	11.0%	25.0%	20.0%	20%	

X	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan			10%	10%	10%	10%	10%	10%	0.00	18.46	10%	10%	
	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpenuhi			45	18 Pekerja	18 Pekerja	18 Pekerja	18 Pekerja	18 Pekerja	57.00	178.00	18 Pekerja	18 Pekerja	
	Jumlah Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan terfasilitasi			24	12	12	12	12	12	0	24	12	12	
XI	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular			10	10	10	10	10	10	23	9.5	10	10	
	Jumlah Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak			525 ekor	550 Ekor	550 Ekor	550 Ekor	550 Ekor	550 Ekor	250	545	550 Ekor	550 Ekor	
	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan yang Dibina			8 Kegiatan	16 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	84	8	15 Kegiatan	15 Kegiatan	
	Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100	100	100 orang	100 orang	
XII	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan			3%	8%	13%	18%	23%	30%	5.00	24%	18%	23%	
XIII	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura			5%	6%	7%	8%	9%	10%	6.00	5%	8%	9%	
	Jumlah serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkendali			0	2000 Hektare	2000 Hektare	2000 Hektare	2000 Hektare	2000 Hektare	0	1800	2000 Hektare	2000 Hektare	
	Jumlah Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura			50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50	45	50 Ha	50 Ha	
	Jumlah Pengendalian Terhadap Serangan OPT Perkebunan (HA)			50	100	100	100	100	100	50	176	100	100	
	Jumlah Peserta Bimtek Pengendalian Penanganan Kebarakaran Lahan Kebun (Orang)			0	50	50	50	50	50	0	200	50	50	
XIV	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani			100.0%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00	100.00	100.0%	100.0%	
XV	Persentase Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh Sertifikat			9.00%	20.3%	31.6%	42.9%	54.2%	65.5%	9.00	20.30	42.9%	54.2%	
	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan			400	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	400	420	500 org	500 org	
	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani			220	220	220	220	220	220	8	270	220	220	

XVI	Persentase cadangan pangan masyarakat			10	10	10	10	10	10	11.00	10.14	10	10	
	Jumlah penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan rumusan penyediaan infrastruktur sumber daya pendukung ketahanan pangan			8	9	9	9	9	9	8	9	9	9	
XVII	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah			87.3	87.4	87,5	87,6	87,7	87,8	87.30	82.43	87,6	87,7	
	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya			17	25	25	25	25	25	17	25	25	25	
	Jumlah cadangan pangan (ton)				65	70	80	90	100	37	10	80	90	
	Jumlah Petugas enumerator			9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	
	Jumlah Laporan konsumsi energi dan Protein			1	13	13	13	13	13	1	11	13	13	
XVIII	Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan (%)			5	5	5	5	5	5	5.00	3.18	5	5	
	Jumlah Pemetaan Rawan Pangan (Kabupaten)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Daerah yang Terdata pada Rawan Pangan (Kabupaten)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
XIX	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			90	90	90	90	90	90	100.00	100	90	90	
	Jumlah Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif (kali)			8	24	24	24	24	24	8	24	24	24	
XX	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			0	1	1	1	1	1			1	1	
	Jumlah Produksi Perikanan tangkap (Ton)			0	961.6	971	981	991	1,001			981	991	
XXI	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)			10	10	10	10	10	10	9.50	9.81	10	10	
	Jumlah Kelembagaan Kelompok Perikanan yang meningkat kelasnya (kelompok)			11	6	11	11	11	11	5	5	11	11	
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			21	18,7	18.7	18.7	18.7	18.7	925	927	18.7	18.7	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2023 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sudah baik, dimana sebagian besar indikator capaiannya berkisar antara 90-100%, bahkan beberapa indikator capaiannya melampaui 100%. Meskipun demikian masih terdapat isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang harus ditangani, yaitu:

- h. Alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian dan alih komoditas menyebabkan beberapa komoditas pertanian mengalami penurunan produksi yang sangat signifikan, sehingga harus menjadi perhatian serius agar dapat menjadi bagian dari gerbang logistic menuju IKN.

- i. Sarana dan prasarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengatasi masalah kekurangan air pada musim kemarau dan masalah kelebihan air pada musim hujan, sehingga tanam tidak bergantung musim bisa lebih dari 1 kali dalam setahun.
- j. Pada tahun 2023 produksi karet masih rendah akibat masih adanya wabah penyakit Gugur Daun Karet (GDK) yang disebabkan oleh jamur *Pestalotopsis* sp. Serangan penyakit GDK ini terjadi secara masif hampir pada seluruh kebun petani di Balangan dan terjadi hampir pada semua wilayah di Kalimantan Selatan yang merupakan penyakit yang penularannya melalui udara, dimana awal munculnya penyakit terjadi di Sumatera Utara pada tahun 2018 dan terus menular melalui udara sebagai akibat kondisi tanaman rentan penyakit karena pemeliharaan dan pemupukan yang sangat kurang disamping akibat utama adalah kelembaban yang tinggi akibat curah hujan yang tinggi.
- k. Belum optimalnya industri hilirisasi pertanian sehingga daya dukung untuk meningkatkan produksi juga masih rendah.
- l. Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi yang dimiliki oleh petani terutama mekanisasi pertanian.
- m. Masih tingginya kehilangan hasil Dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
- n. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani.

- o. Ada beberapa kelompok tani yang belum menerapkan manajemen kelompok dengan optimal.
- p. Kualitas SDM petani yang relatif masih rendah, membatasi kemampuan petani dalam penguasaan dan inovasi teknologi, sehingga sistem budidaya yang digunakan masih banyak yang tradisional;
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petani masih perlu dibenahi/penambahan
- r. Rendahnya permodalan yang dipunyai petani, membatasi petani untuk membeli sarana produksi dan sarana pertanian;
- s. Kelembagaan petani (walaupun jumlahnya besar) kemampuannya relative masih rendah;
- t. Minat generasi muda terhadap pertanian relatif rendah;
- u. Tidak dimilikinya data base untuk potensi dan kebutuhan pengembangan pertanian di tiap desa dan Kecamatan, sehingga pengembangan kawasan baik pertanian maupun perikanan masih sangat sulit, akibatnya perencanaan penganggaran tidak maksimal;
- v. Masih rendahnya pengetahuan tentang manfaat diversifikasi pangan dan masih kurangnya kerjasama untuk menangani Daerah rawan pangan serta masih belum adanya Rencana Aksi Pangan Gizi untuk Kabupaten Balangan.

2.4 REVIUW TERHADAP RKPD

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Balangan di tahun 2025 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah Pemenuhan infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif, dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya (tahun 2023), serta memperhatikan perkiraan capaian di tahun 2024, target kinerja di tahun 2024, serta isu-isu strategis di tahun 2025.

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021, merupakan tahun awal RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2025.

Keterkaitan isu-isu strategis dengan program prioritas pembangunan pertanian sebagai berikut : Isu strategis terkait Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan Prioritas Daerah Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan.

Kemudian dengan memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan pertanian Kabupaten Balangan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, prioritas misi II pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dijabarkan ke dalam 3 fokus, yaitu:

- a. Peningkatan produksi dan produktifitas Pertanian dan Perikanan serta peningkatan Ketahanan Pangan dengan focus:
 1. Pengembangan Padi Khusus 150 Ha
 2. Peningkatan Indek Pertanaman 130 Ha
 3. Pengadaan benih padi MH dan MK 3000 Ha
 4. Pengadaan Herbisida 2000 Ha
 5. Pengadaan NPK 1000 Ha
 6. Pengembangan jagung Hibrida 350 Ha
 7. Budidaya Kacang Tanah 10 Ha
 8. Pengadaan benih padi penangkar 100 Ha
 9. Budidaya Tanaman Cabe 30 Ha
 10. Pengendalian OPT dan penanggulangan akibat dampak bencana pertanian.
 11. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tata kelola air
 12. Peningkatan penyediaan bibit ternak
 13. Peningkatan kelahiran hasil IB
 14. Penurunan penyakit hewan menular
 15. Peningkatan kesadaran biosecurity, vaksinasi dan penandaan ternak
 16. Fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap
 17. Pengembangan stasiun pembenihan dan pengembangan ikan lokal
 18. Peningkatan kapasitas produksi bibit ikan di BBIL Gunung Manau
 19. Peramajaan tanaman karet tua dan rusak seluas 1.500 ha
 20. Pembelian pupuk tanaman untuk tanaman karet yang menghasilkan yang mengalami gejala pandemi gugur daun

21. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat

- b. Penguatan hilirisasi sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan, dengan focus:
 1. Alat pengolahan hasil pertanian TPH : dryer biasa dan dryer UV untuk jagung dan padi, mesin pencacah/penggilingan jagung, mesin pemipil jagung. alat pengolahan dan cabe bubuk dan sarana UPH TPH
 2. Peningkatan pengetahuan pengelolaan dan pengolahan pasca panen TPH dan diversifikasi hasil Perkebunan
 3. Peningkatan pengetahuan pengelolaan pasca panen produk hasil ternak dan hasil perikanan
 4. Sarana pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan perikanan.
- c. Pengembangan Kawasan Agropolitan
 1. Fasilitasi sarana Pengembangan Kawasan Agropolitan untuk Tanaman Pangan.
 2. Pembebasan Lahan untuk sarana prasarana Kawasan agropolitan
 3. Pembangunan Infrastruktur untuk pengembangan Kawasan agropolitanDalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Secara keseluruhan dan detil hasil telaahan dan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Balangan pada urusan pilihan pertanian, Urusan Pangan dan Urusan Kelautan dan Perikanan disajikan pada Tabel T-C. 31 berikut.

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BALANGAN

Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Lokasi	target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	DKP3	73 (BB)	82.770.834.298	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	DKP3	73 (BB)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	DKP3	100%	573.098.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	DKP3	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	DKP3	100%	22.701.663.740	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	DKP3	100%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP3	100%	779.240.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP3	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	DKP3	100%	1.050.331.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	DKP3	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKP3	100%	2.628.380.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKP3	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP3	12 Bulan	444.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP3	12 Bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP3	12 Bulan	860.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP3	12 Bulan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	Kabupaten Balangan	16,00%	31.499.668.268	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	Kabupaten Balangan	16,00%	
	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	Kabupaten Balangan	18,00%			Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	Kabupaten Balangan	18,00%	
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Kabupaten Balangan	18,00%			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Kabupaten Balangan	18,00%	
	Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	Kabupaten Balangan	53,00%			Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	Kabupaten Balangan	53,00%	
	Persentase Peningkatan Produksi Daging	Kabupaten Balangan	3,50%			Persentase Peningkatan Produksi Daging	Kabupaten Balangan	3,50%	
	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	Kabupaten Balangan	6,00%			Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	Kabupaten Balangan	6,00%	
	Persentase Peningkatan sarana Pertanian	Kabupaten Balangan	25%			Persentase Peningkatan sarana Pertanian	Kabupaten Balangan	25%	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Indeks Pertanaman	Kabupaten Balangan	275 Ha	13.407.175.168	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Indeks Pertanaman	Kabupaten Balangan	275 Ha	
	Jumlah Peningkatan Penggunaan Pupuk Berimbang Pada Indeks Pertanaman	Kabupaten Balangan	125 Ha			Jumlah Peningkatan Penggunaan Pupuk Berimbang Pada Indeks Pertanaman	Kabupaten Balangan	125 Ha	

	Jumlah Sarana Pertanian Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Balangan	148			Jumlah Sarana Pertanian Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Balangan	148	
	Jumlah Demplot Sarana Penyuluhan dalam budidaya tanaman Hortikultura	Kabupaten Balangan	4 unit			Jumlah Demplot Sarana Penyuluhan dalam budidaya tanaman Hortikultura	Kabupaten Balangan	4 unit	
	Jumlah Benih/Bibit dan Sarana Produksi Hortikultura	Kabupaten Balangan	9 Paket			Jumlah Benih/Bibit dan Sarana Produksi Hortikultura	Kabupaten Balangan	9 Paket	
	Jumlah UPPB dan Kel Tani penerima bantuan Sarana Pertanian	Kabupaten Balangan	82			Jumlah UPPB dan Kel Tani penerima bantuan Sarana Pertanian	Kabupaten Balangan	82	
	Jumlah Luas Rehabilitasi dan Penanaman Tanaman Perkebunan	Kabupaten Balangan	175			Jumlah Luas Rehabilitasi dan Penanaman Tanaman Perkebunan	Kabupaten Balangan	175	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Kabupaten Balangan	1 Ton	16.666.909.100		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Kabupaten Balangan	1 Ton	
	Jumlah benih kelas tinggi yang dihasilkan	Kabupaten Balangan	2500 Kg			Jumlah benih kelas tinggi yang dihasilkan	Kabupaten Balangan	2500 Kg	
	Jumlah Pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura (Pasca Panen)	Kabupaten Balangan	280			Jumlah Pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura (Pasca Panen)	Kabupaten Balangan	280	
	Jumlah Pameran Produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	5 kali			Jumlah Pameran Produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	5 kali	
	Jumlah kontes buah Durian dan Buah langka lainnya	Kabupaten Balangan	1 kali			Jumlah kontes buah Durian dan Buah langka lainnya	Kabupaten Balangan	1 kali	
	Jumlah Luas Penangkaran Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	50 Hektare			Jumlah Luas Penangkaran Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	50 Hektare	
	Jumlah Kebun Koleksi dan Entrys yang terpelihara	Kabupaten Balangan	12 Ha			Jumlah Kebun Koleksi dan Entrys yang terpelihara	Kabupaten Balangan	12 Ha	
	Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	10 kegiatan			Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	10 kegiatan	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	4	195.253.000		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	4	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	Kabupaten Balangan	200900	1.230.331.000		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	Kabupaten Balangan	200900	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Balangan	20,0%	4.094.597.500		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Balangan	20,0%	
	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Kabupaten Balangan	10%			Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Kabupaten Balangan	10%	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Balangan	18 Pekerjaan	3.509.709.500		Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Balangan	18 Pekerjaan	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	12	584.888.000		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	12	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten Balangan	10	1.451.664.600		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten Balangan	10	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Kabupaten Balangan	550 Ekor	914.329.200		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Kabupaten Balangan	550 Ekor	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kabupaten Balangan	15 Kegiatan	188.162.200		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kabupaten Balangan	15 Kegiatan	
	Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	Kabupaten Balangan	100 orang	349.173.200		Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	Kabupaten Balangan	100 orang	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Balangan	18%	1.622.893.090		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Balangan	18%	
	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	Kabupaten Balangan	8%			Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	Kabupaten Balangan	8%	
	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	8%			Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	8%	

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkendali	Kabupaten Balangan	2000 Hektare	1.622.893.090	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkendali	Kabupaten Balangan	2000 Hektare	
	Jumlah Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	50 Ha			Jumlah Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	50 Ha	
	Jumlah Pengendalian Terhadap Serangan OPT Perkebunan (HA)	Kabupaten Balangan	100			Jumlah Pengendalian Terhadap Serangan OPT Perkebunan (HA)	Kabupaten Balangan	100	
	Jumlah Peserta Bimtek Pengendalian Penanganan Kebarakaran Lahan Kebun (Orang)		50			Jumlah Peserta Bimtek Pengendalian Penanganan Kebarakaran Lahan Kebun (Orang)		50	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Kabupaten Balangan	100.0%	3.082.888.300	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Kabupaten Balangan	100.0%	
	Persentase Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bakar yang memperoleh Sertifikat	Kabupaten Balangan	42.9%			Persentase Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bakar yang memperoleh Sertifikat	Kabupaten Balangan	42.9%	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kabupaten Balangan	500 org	3.082.888.300	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kabupaten Balangan	500 org	
	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Kabupaten Balangan	220			Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Kabupaten Balangan	220	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	Kabupaten Balangan	10	1189262300	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	Kabupaten Balangan	10	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan rumusan penyediaan infrastruktur sumber daya pendukung ketahanan pangan	Kabupaten Balangan	9	1189262300	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan rumusan penyediaan infrastruktur sumber daya pendukung ketahanan pangan	Kabupaten Balangan	9	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Kabupaten Balangan	87,6	3.475.613.100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Kabupaten Balangan	87,6	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Kabupaten Balangan	25	924.269.600	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Kabupaten Balangan	25	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan (ton)	Kabupaten Balangan	80	1.735.809.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan (ton)	Kabupaten Balangan	80	
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Petugas enumerator	Kabupaten Balangan	9	49.984.900	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Petugas enumerator	Kabupaten Balangan	9	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan konsumsi energi dan Protein	Kabupaten Balangan	13	765.549.600	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan konsumsi energi dan Protein	Kabupaten Balangan	13	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan (%)	Kabupaten Balangan	5	422.464.500	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan (%)	Kabupaten Balangan	5	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Pemetaan Rawan Pangan (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1	301.313.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Pemetaan Rawan Pangan (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah yang Terdata pada Rawan Pangan (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1	121.151.500	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah yang Terdata pada Rawan Pangan (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Kabupaten Balangan	90	129.119.600	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Kabupaten Balangan	90	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif (kali)	Kabupaten Balangan	24	129.119.600	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif (kali)	Kabupaten Balangan	24	

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Kabupaten Balangan	1	121.275.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Kabupaten Balangan	1	
<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,</i>	Jumlah Produksi Perikanan tangkap (Ton)	Kabupaten Balangan	981	121.275.000	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,</i>	Jumlah Produksi Perikanan tangkap (Ton)	Kabupaten Balangan	#VALUE!	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)	Kabupaten Balangan	10	5.395.848.900	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)	Kabupaten Balangan	10	
<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	Jumlah Kelembagaan Kelompok Perikanan yang meningkat kelasnya (kelompok)	Kabupaten Balangan	11	98.898.000	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	Jumlah Kelembagaan Kelompok Perikanan yang meningkat kelasnya (kelompok)	Kabupaten Balangan	11	
<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Kabupaten Balangan	18.7	5.296.950.900	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Kabupaten Balangan	18.7	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	Kabupaten Balangan	4	123.137.000,00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	Kabupaten Balangan	4	
<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,</i>	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	Kabupaten Balangan	315.86	123.137.000,00	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,</i>	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	Kabupaten Balangan	315.86	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Kabupaten Balangan	23.00	1.124.488.500,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Kabupaten Balangan	23.00	
<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Angka Konsumsi Ikan	Kabupaten Balangan	57,12	1.091.915.500,00	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Angka Konsumsi Ikan	Kabupaten Balangan	57.12	
<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang diberikan (Paket)	Kabupaten Balangan	1,00	32.573.000,00	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang diberikan (Paket)	Kabupaten Balangan	1.00	
JUMLAH				82.770.834.298	JUMLAH				
H					H				

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan merupakan hasil dari usulan-usulan yang terangkum dalam Musrenbang Kecamatan dan usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan di Tahun 2024, berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Serta harus mencantumkan usulan yang jelas disertai nama kelompok tani, Kelompok budidaya ikan, Kelompok Wanita Tani yang terregistrasi dan terdaftar dan sudah di SK kan sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan melampirkan proposal bantuan.

Rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 dan usulan pokok-pokok pikiran yang diajukan untuk Tahun 2025 ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang masih dilakukan verifikasi untuk dapat dimasukkan ke dalam Renja 2025 yang disajikan pada Tabel T-C.32 berikut :

TABEL T-C.32
FORM HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2024
YANG MASIH DIVERIFIKASI UNTUK DAPAT AKOMODIR DI RENJA 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	ANGGARAN
13	PAJRIANUR	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pertanian/ Perkebunan	Pembangunan Ladang atau Pondok di Persawahan. Diperlukan ladang sekitar 7-10 buah di beberapa titik di persawahan di wilayah desa teluk karya dengan ukuran 2 x 2 m perbuahnya. Hal ini dikarenakan perlu adanya tempat berteduh untuk para petani ketika sedang istirahat bekerja di sawah.	Desa Teluk Karya RT. 01 dan RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Titik Koordinat -2.398101, 115.324079, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Lampihong	Teluk Karya	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	100.000.000
14	PAJRIANUR	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pertanian/ Perkebunan	Pembangunan Balai Pertemuan Pertanian. Berukuran 10 x 10 m. Hal ini dikarenakan belum adanya balai pertemuan pertanian untuk kelompok tani mengadakan pertemuan di lahan persawahan.	Desa Teluk Karya RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Titik Koordinat -2.398877, 115.328022, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Lampihong	Teluk Karya	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	100.000.000
53	PARHAN	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pertanian/ Perkebunan	Pembangunan Saung/Pondok di Tengah Sawah sebanyak 5 buah Ukuran 2,5 Meter x 2,5 Meter Kondisi : karna Sebagian besar masyarakat desa adalah Petani Permasalahan : jauhnya jarak berteduh petani ketika hujan menuju pinggir persawahan	Desa Sungai Tabuk RT. 002, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Lampihong	Sungai Tabuk	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	100.000.000
126	JAINUDDIN	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jalan bebatuan dan tanah	Desa Baramban Lat -2.423008 Long 115.540301, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Baramban	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi,	200.000.000

								Surat Hibah	
299	YANSYAH	Bantuan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	tidak ada tempat diskusi dan sosialisasi di area persawahan untuk gapoktan desa	Desa Marias RT.002, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Juai	Marias	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	100.000.000
301	YANSYAH	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pertanian/ Perkebunan	tidak ada tempat diskusi dan sosialisasi di area persawahan untuk gapoktan desa	Desa Marias RT.004, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Juai	Marias	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	100.000.000
334	KEC. AWAYAN	Pembangunan Gedung/ Kantor	Pembuatan Pondok Pertemuan di Lahan Belakang BPP	Desa Putat Basiun Rt 01 Kecamatan Awayan, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Awayan	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	100.000.000
33	SAHMADI	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	Bibit tanaman yang diperlukan seperti bibit kelapa hebrida karena di Desa masih banyak terdapat lahan yang kosong dan nantinya akan menjadi lahan yang tepat guna dan dapat meningkatkan penghasilan Petani/Pekebun	Desa Jungkal Rt. 01-04, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Lampihong	Jungkal	Sesuai kewenangan, usulan dilengkapi dengan proposal, foto lokasi, dan titik koordinat.	30.000.000
129	SUKARMAN, S.Sos	Bantuan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	Bantuan Pupuk dan Obat-obatan. Warga desa Baruh Bahinu Dalam sedang dalam taraf kehidupan yang memprihatinkan, taraf kemiskinan meningkat disebabkan harga karet yang murah dan hasil produksi karet yang sedikit karena pohon karet banyak	Desa Baruh Bahinu Dalam Kecamatan Paringin Selatan, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	Sesuai kewenangan, usulan dilengkapi dengan proposal, foto lokasi, dan titik koordinat.	100.000.000
151	SUGIONOR	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	Belum Pernah ada bantuan Ternak sapi dan Kambing	Desa Gulinggang RT,01,02 dan RT 03 Kec.Juai Kab.Balangan, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Juai	Gulinggang	Usulan Sapi ditolak (motarorium) dan Usulan kambing diterima dengan catatan proposal kelompok	100.000.000

								sudah diserahkan ke bagian Peternakan	
167	BUDI HANDOKO	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	Pengadaan Ternak Kambing	Desa Suryatama RT 07, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Halong	Suryatama	Usulan diterima dengan catatan proposal kelompok sudah diserahkan ke bagian Peternakan	100.000.000
168	RUSTAM	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Peternakan	Banyak minat masyarakat untuk beternak	Desa Nungka RT.01,02,03,04, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Nungka	Usulan diterima dengan catatan proposal kelompok sudah diserahkan ke bagian Peternakan	100.000.000
172	H. ABU BAKAR	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	masyarakat piyait yang ingin memelihara ternak kambing , namun untuk membelinya tidak mampu, di mohon agar dinas terkait bisa membantu ternak kambing tersebut.	Desa Piyait RT. 02, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Piyait	Usulan diterima dengan catatan proposal kelompok sudah diserahkan ke bagian Peternakan	100.000.000
173	H. ABU BAKAR	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Peternakan	sebagian Masyarakat Piyait yang sudah ada memelihara Kambing, namun untuk membuat kandang Ternak Kambing tersebut tidak mampu membuatnya, sehingga kambing kambing mereka camuh kesana kemari	Desa Piyait. RT. 02, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Piyait	Usulan diterima dengan catatan proposal kelompok sudah diserahkan ke bagian Peternakan	100.000.000
233	SANTI	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Peternakan	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Peternakan Kambing untung menambah pendapatan warga	Desa Tampang Rt. 03, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Lampihong	Tampang	Usulan diterima dengan catatan proposal kelompok sudah diserahkan ke bagian Peternakan	100.000.000
23	RUSTAM	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Belum pernah diberikan keramba	Desa Nungka RT.01,02,03,04, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Nungka	-	200.000.000

24	RUSTAM	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Masyarakat ingin beternak ikan	Desa Nungka RT.01,02,03,04, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Nungka	-	200.000.000
31	ALIANSYAH NOR	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kolamnya sudah ada, sedangkan bibit ikan, pakan dan peralatan pendukungnya belum ada.	Desa Karuh RT. 05, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Batu Mandi	Karuh	-	200.000.000
52	H. SULAIMAN	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	BUDIDAYA IKAN BIOFLOK	Jl. A. Yani Desa Dahai Rt.01 Gg.Adi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Koordinat - 2.270089,115.4815299, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin	Dahai	-	200.000.000
59	YANNOR	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Harga Pakan Berporotien Tinggi Cukup Mahal, untuk menekan biaya pakan perlu pengadaan 2 Buah mesin pembuat/pengulah pakan ikan	Desa panimbaan Rt. 01 dan 02 kec. juai Kab. Balangan, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Juai	Panimbaan	-	100.000.000
71	HADRIANSYAH S.Sos	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Pengadaan bibit ikan nila dan patin	Maradap Rt 1, 2, 3, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Maradap	-	50.000.000
78	KHAMDANI	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Bioplok lengkap dengan bibit ikanya Kelompok Perikanan "SALUANG MUDIK"	Desa Badalungga Rt 04, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Badalungga	-	200.000.000
80	HADRIANSYAH S.Sos	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	pembuatan kolam ikan	Desa Maradap, Baman balang,telaga liang rt 01, 02, 03, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Maradap	-	200.000.000
100	HURHANI	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan, Bantuan Bioflok untuk Kelompok Perikanan	Desa Putat Basiun RT 001 Kec. Awayan Kab. Balangan Lat -2.4143345° Long 115.5350612°, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Putat Basiun	-	200.000.000
102	MULYADI	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	perlu nya penambahan bibit dan pakan pada kelompok ikan di desa juai, yaitu ikan nila	desa juai, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Juai	Juai	-	100.000.000
107	SUGIANOR	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	Tidak adanya modal yang tersedia untuk pembelian bibit dan pakan untuk ikan	Desa Inan Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Inan	-	100.000.000

109	M.YAMIN	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Tinggi kebutuhan ikan dalam pemenuhan protein bagi masyarakat, dan belum ada budidaya ikan lokal di desa Kedondong	Desa Kedondong rt.004, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Kedondong	-	200.000.000
114	RAKHMADI	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Belum tersedianya kolam ikan bioflok	Desa Tangalin, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Tangalin	-	200.000.000
137	SUGIANOR	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Tidak ada dana untuk mengadakan Bibit dan Pakan Ikan menjadi kendala utama dalam melaksanakan budidaya Perikanan yang telah direncanakan.	Desa Inan Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Inan	-	100.000.000
166	BUDI HANDOKO	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	Pengadaan Bioflog dan Bibit Ikan	Desa Suryatama RT 04, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Halong	Suryatama	-	200.000.000
188	HATRIAH	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Belum adanya Keramba untuk Budi Daya Ikan Jenis Mas dan Nila	Lokasi untuk Budi Daya Ikan Nila dan di sungai Pitap terletak di Rt. 01,02,03 di Desa Galumbang , Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Galumbang	-	200.000.000
200	ARBUDIN	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	bibit anak nila untuk kebutuhan kolam bioflok	Desa Tigarun, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Juai	Tigarun	-	200.000.000
204	MURHANI	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Tidak adanya bibit ikan sedangkan kolam ikannya sudah tersedia	Desa Lok Batu RT 03 , Kab. Balangan	Kab. Balangan	Batu Mandi	Lok Batu	-	200.000.000
211	ABDUL HADI	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Bantuan pengadaan bibit dan pakan ikan	Desa Hujan Mas , Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin	Hujan Mas	-	100.000.000
213	IRHAMDI	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Permintaan Keramba Ikan untuk Kelompok Budidaya Ikan - 2.442383, 115.540795 Pumpung River, Awayan, Balangan Regency, South Kalimantan	Desa Bihara RT.01, RT.02, dan RT.03, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Awayan	Bihara	-	200.000.000

232	Hj. LAILI NOR	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Keterbatasannya Bibit Ikan di Pasaran dan kurang nya biaya	Desa Mangkayahu Rt 02, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin	Mangkayahu	-	50.000.000
252	SAHRIDIN	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Ikan salah satu sumber makan hewani yang cukup terjangkau mengingat kebutuhan akan kecukupan akan pemenuhan akan ikan maka dari itu perlu untuk bisa berkecimpung untuk memberikan sumbangsih dalam pemenuhan kebutuhan tersebut pada lingkungan desa maupun kab balangan serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.	Jl. Gunung Pandau Rt. 2 Desa Balida Kec Paringin Kab Balangan, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin	Balida		200.000.000
266	Hj. LAILI NOR	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Memerlukan pakan ikan agar dapat menunjang kegiatan keramba ikan berhasil bantuan pakan ikan sangat diperlukan	Desa Mangkayahu Rt 02, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin	Mangkayahu	-	200.000.000
295	BUDIANNOR	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Belum Adanya Bibit dan Pakan Ikan Untuk Kolam	Desa Telaga Purun Rt 02, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Telaga Purun	-	100.000.000
297	BUDIANNOR	Bantuan Bibit Tanaman/ Ternak	Belum Adanya Bibit dan Pakan Ikan Untuk Kolam	Desa Telaga Purun Rt 03, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Paringin Selatan	Telaga Purun	-	100.000.000
319	MURHANI	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Belum adanya bibit ikan nila sedangkan kolam ikannya sudah tersedia	Desa Lok Batu Rt 03, Kab. Balangan	Kab. Balangan	Batu Mandi	Lok Batu	-	100.000.000
356	PANSYAH, S.Pd	Pengelolaan jaringan irigasi tersier/kuarter ditingkat usahatani	SAWAH DI SEKITAR KERING	SIKONTAN RT 1,2,3 KEC. AWAYAN KAB. BALANGAN, Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	Awayan	Sikontan	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	200.000.000
360	NANANG TRIANTO	Pengelolaan jaringan irigasi tersier/kuarter ditingkat usahatani	PEMBUATAN IRIGASI DAN PINTU AIR DESA SIRAP	DESA SIRAP, Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	Juai	Sirap	Titik Koordinat, Proposal Kelompok tani, Foto Lokasi, Surat Hibah	200.000.000

TABEL T-C.32
FORM HASIL USULAN POKOK POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2024
YANG MASIH DIVERIFIKASI UNTUK DAPAT AKOMODIR DI RENJA 2025

NO	PENGUSUL	NAMA POKIR/USULAN	ALAMAT	PAGU DITERIMA	Bidang	Sub Kegiatan
1	ABI YANI	Rehab Pembuatan Betonisasi Jalan Usaha Tani Parawin	Desa Baruh Bahinu Luar	Rp 150.000.000	pekerjaan JUT ataupun Japro yang lokasinya 1 Desa akan dilakukan konsolidasi pekerjaan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	ABI YANI	Rehab Pembuatan Betonisasi Jalan Usaha Tani Luwau	Desa Baruh Bahinu Luar	Rp 150.000.000	pekerjaan JUT ataupun Japro yang lokasinya 1 Desa akan dilakukan konsolidasi pekerjaan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3	ABI YANI	Pembuatan Betonasi Jalan Usaha Tani Lanjutan	Desa Inan RT. 03 RT.6	Rp 200.000.000	pekerjaan JUT ataupun Japro yang lokasinya 1 Desa akan dilakukan konsolidasi pekerjaan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4	ABI YANI	Pembuatan Betonisasi Jalan Produksi Arah Kandang Ayam Petelur	Desa Maradap	Rp -	Tidak menerima jalan menuju kandang ayam petelur, karena ayam petelornya moratorium	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
5	ABI YANI	Pembuatan Betonasi Jalan Usaha Tani	Desa Riwa	Rp 200.000.000	pekerjaan JUT ataupun Japro yang lokasinya 1 Desa akan dilakukan konsolidasi pekerjaan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Rp 700.000.000		
7	AGUS REYANTO	Pembuatan Kolam	Desa Uren RT.04	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8	AGUS REYANTO	Pembuatan Kolam	Desa Hauwai	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1

						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9	AGUS REYANTO	Pembuatan Kolam	Desa Pemurus	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10	AGUS REYANTO	Pembuatan Kolam	Desa Lalayau	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
11	AGUS REYANTO	Pembuatan Kolam	Desa Sungai Batung RT.02	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
12	AGUS REYANTO	Pembuatan Kolam	Desa Gulinggang RT.01	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
13	AGUS REYANTO	Pembuatan Kolam	Desa Gunung Riut RT. 03	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rp 1.400.000.000		
14	AHMAD YANI	Jalan Produksi	Desa Juuh RT. 01	Rp 200.000.000	pekerjaan JUT ataupun Japro yang lokasinya 1 Desa akan dilakukan konsolidasi pekerjaan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
15	AHMAD YANI	Jalan Usaha Tani (JUT) Pamarian	Desa Auh RT. 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
16	AHMAD YANI	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Kambiyain RT. 01	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rp 600.000.000		
17	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Produksi	Desa Tampang RT.01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
18	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Munjung RT 02	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

19	AHSANI FAUZAN	Rehabilitasi JUT	Desa Munjung RT 03	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
20	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Inan RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
21	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Tebing Tinggi	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
22	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Gunung Batu RT 03	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
23	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Hamarung RT 03	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
24	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Produksi	RT. 11 Harapan Baru Kelurahan Batu Piring	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
25	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	RT. 13 Kelurahan Paringin Kota	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
26	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Produksi	Desa Gunung Batu RT 03	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
27	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Piyait RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

28	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Ambakiyang RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
29	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Ambakiyang RT 04	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
30	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT (Rumiang)	Desa Tundakan RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
31	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT (Kalat/Tundakan Hulu)	Desa Tundakan RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
32	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Mamigang RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
33	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Uren RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
34	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Produksi	Kelurahan Paringin Timur RT 08	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
35	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan JUT	Desa Dayak Pitap RT. 02	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
36	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Pulantan RT.01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

37	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Green House Hantanung	Desa Gunung Batu RT. 03	Rp 150.000.000		Peningkatan ketahanan pangan keluarga
38	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Green House	Desa Balida RT. 03	Rp 150.000.000		Peningkatan ketahanan pangan keluarga
39	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Lingsir	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
40	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Badalungga Hilir RT. 03 (Pinakin)	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
41	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam Ikan	Desa Uren RT 01	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
42	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam Ikan	Desa Mamigang RT 01	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
43	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam Ikan	Desa Uren RT 02	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
44	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Badalungga RT 04	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
45	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Maradap	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

46	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Gunung Batu RT 01	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
47	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Balida RT 04	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
48	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Dayak Pitap RT. 02	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
49	AHSANI FAUZAN	Permohonan Pembuatan Kolam, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Gunung Batu RT. 02	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rp 6.500.000.000		
50	AKHMAD FAUZI	JUT	Desa Mampari Rt.4 Kec. Batumandi	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
51	AKHMAD FAUZI	JUT	Desa Merah RT.4 Kec. Batumandi	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
52	AKHMAD FAUZI	JUT	Desa Munjung RT.2 Kec. Batumandi	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
53	AKHMAD FAUZI	Mesin Rumput Kelompok Mekar Sari 20 buah	Desa Guha Kec. Batumandi	Rp 3.000.000		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
54	AKHMAD FAUZI	Mesin Perontok Padi Kelompok Pelita Harapan 3 Buah	Desa Nungka Kec. Batumandi	Rp 9.000.000	MAKSIMAL MENERIMA PER KELOMPOK 3 UNIT MESIN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Rp 612.000.000		
55	BAHRUL ILMU	Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Papuyuan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

56	BAHRUL ILMI	Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Lajar	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
57	BAHRUL ILMI	Balai Pertemuan Pertanian	Desa Lajar RT.01	Rp -	TIDAK ADA KELOMPOK PENGUSUL	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
58	BAHRUL ILMI	Kandang Sapi KT Peternakan Lajar	Desa Lajar	Rp 200.000.000	BER-SK (RANAH P5)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
				Rp 600.000.000		
59	H. MULYADI	Pembuatan Gudang Penampung Lom/Karet	Kel Karya Tani Bersama Desa Baramban RT. 3 Kec. Awayan	Rp 107.540.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024, TIDAK DITERIMA KARENA TIDAK ADA KELOMPOK PENGUSUL	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
60	H. MULYADI	Peningkatan jalan usaha tani desa badalungga kec.Awayan rt.03	Desa Badalungga RT.3 Kec. Awayan	Rp 150.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
61	H. MULYADI	Pembuatan Balai pertemuan kelompok tani desa badalungga ke,awayan	Desa Badalungga Kec. Awayan	Rp 150.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
62	H. MULYADI	Pembuatan siring kolam ikan kelompok tani desa bramban rt.03		Rp 150.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rp 557.540.000		
63	HJ. ERLY S	Jalan Produksi	Desa Hamparaya Kec. Batumandi	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
64	HJ. ERLY S	Jalan Produksi	Desa Timbun Tulang Kec. Batumandi	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Rp 400.000.000		

65	H. RUSDI HSY, SE	Pengadaan Mesin Penggiling Padi Kelompok Sumber Rejeki	Desa Buntu Pilanduk Kec. Halong	Rp -	SUDAH DILAKSANAKAN 2024, DENGAN PAGU 150.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
66	H. RUSDI HSY, SE	Rumah Produksi Kelompok Muria Jaya / Lumbung pangan Kelompok Muria Jaya	Desa Suryatama	Rp 156.045.600	KURANG PAGU SEHARUSNYA 156.045600	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
67	H. RUSDI HSY, SE	Rumah Produksi Kelompok Berkah Usaha / Lumbung Pangan Kelompok berkah usaha	Desa Mungkur Uyam	Rp 156.045.600	KURANG PAGU SEHARUSNYA 200.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
68	H. RUSDI HSY, SE	Pembuatan/Peningkatan Jalan Produksi	Desa Suryatama RT.06	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
69	H. RUSDI HSY, SE	JUT	Desa Mamigang	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
70	H. RUSDI HSY, SE	JUP	Desa Sumber Agung	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
71	H. RUSDI HSY, SE	JUP	Desa Binuang Santang	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
72	H. RUSDI HSY, SE	Jalan Usaha Produksi	Desa Binjai Punggal	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
73	H. RUSDI HSY, SE	Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan	Desa Bihara Hilir	Rp 100.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

74	H. RUSDI HSY, SE	Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan	Desa Baru	Rp 100.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
75	H. RUSDI HSY, SE	Pembuatan Kolam Tanah, Bibit dan Pakan Ikan	Desa Kedondong	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
76	H. RUSDI HSY, SE	Pengadaan Kolam Bioflok , Bibit dan Pakan Kelompok Tunas Harapan	Desa Hauwai	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
77	H. RUSDI HSY, SE	Pengadaan Kolam Bioflok , Bibit dan Pakan Kelompok Kundilan Jaya	Desa Baruh Panyambaran	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
78	H. RUSDI HSY, SE	Pembuatan Kolam Tanah, Bibit dan Pakan Kelompok Limpasu Indah	Desa Binjai Punggal	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
79	H. RUSDI HSY, SE	Pembuatan Kolam Tanah, Bibit dan Pakan Kelompok Jabang Indah	Desa Binjai Punggal	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
80	H. RUSDI HSY, SE	Pengadaan Mesin Penggiling Padi (KD 820 Pro-C) Kelompok Muda Kreatif	Desa Baruh Panyambaran	Rp 150.000.000	KURANG PAGU SEHARUSNYA 150.000.000	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya
				Rp 2.662.091.200		
81	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Inan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
82	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Panggung	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

83	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Galumbang	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
84	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Maradap	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
85	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pengadaan Kambing	Desa Matang Hanau RT.4	Rp -	DITOLAK, TIDAK ADA NAMA KELOMPOK	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
86	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Telaga Purun	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
87	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Baruh Bahinu Dalam	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
88	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Murung Abuin	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
89	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Inan,	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
90	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Panggung	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
91	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Maradap	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

92	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Lingsir	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
93	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Halubau Utara	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
94	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Tarangan	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
95	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Lamida Bawah	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
96	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Balida	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
97	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Kalahiang	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
98	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Hujan Mas	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
99	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Lasung Batu	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
100	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Dahai	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

101	HAFIS ANSYARI, S.PD	Pembuatan Kolam Ikan (Kel. Sejahtera)	Desa Dahai	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rp 4.000.000.000		
102	HANIL TAMJID	Pembangunan JL.Produksi Hutan Murung Anam	Desa Hukai Kec.Juai	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
103	HANIL TAMJID	Pembangunan JL.Produksi	Desa Hukai RT.01 Kec.Juai	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
104	HANIL TAMJID	Ternak Ayam Petelor dan pakan Poktan Panca Usaha 5	Desa Hukai Kec.Juai	Rp -	DITOLAK (AYAM PETELOR MASUK SKALA BISNIS / MORATORIUM)	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
105	HANIL TAMJID	Ternak Ayam Petelor dan pakan Poktan Bina Swarga	Desa Hukai Kec.Juai	Rp -	DITOLAK (AYAM PETELOR MASUK SKALA BISNIS / MORATORIUM)	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Rp 400.000.000		
106	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Jalan Produksi	Desa Juuh RT.4	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
107	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Jalan Produksi	Desa Tundakan Hulu	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
108	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Kolam Ikan Tanah	Desa Mantimin	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

109	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Mantimin	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
110	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Jalan Produksi	Desa Mampari	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
111	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Jalan Produksi	Desa Banua Hanyar	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
112	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Juuh	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
113	HJ. LINDAWATI, S.SOS	Jalan Produksi	Desa Teluk Mesjid	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Rp 1.600.000.000		
114	M. IFDALI	Peningkatan JUT Tambiripan	Desa Lalayau Kec. Juai	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
115	M. IFDALI	Peningkatan JUT Mihu Menuju Mure	Desa Mihu Rt. 5 Kec. Juai	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
116	M. IFDALI	Pembuatan JUT Susumbu	Desa Baruh Panyambaran Kec. Halong	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
117	M. IFDALI	Peningkatan JUT Dukuh	Desa Baruh Panyambaran Rt.I Kec. Halong	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

118	M. IFDALI	JUT Hantasan	Desa Binju Kec. Halong	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
119	M. IFDALI	JUT	Desa Binju Kec. Halong	Rp 200.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
120	M. IFDALI	Balai Pertemuan Kelompok Tani	Desa Binju Kec. Halong	Rp -	Pindahan dari rencana Perubahan 2024, TIDAK DITERIMA KARENA TIDAK ADA KELOMPOK PENGUSUL	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
121	M. IFDALI	Balai Pertemuan Petani	Desa Jungkal Kec. Lampihong	Rp -	Pindahan dari rencana Perubahan 2024, TIDAK DITERIMA KARENA TIDAK ADA KELOMPOK PENGUSUL	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
122	M. IFDALI	pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Binju Kec. Halong , Kab.Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
123	M. IFDALI	Pembangunan Jalan Usaha Tani (sungai upak)	Desa Baruh Panyambaran RT.O1 dan 02 Kec. Halong, Kab.Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
124	M. IFDALI	pembangunan Jalan Usaha Tani (Rmania) , 02, Dan 03 , Kab. Balangan	Desa Baruh Panyambaran RT 01	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
125	M. IFDALI	Pembangunan Jalan Produksi	Desa Marajai Kec. Halong , Kab.Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
126	M. IFDALI	JUT	Desa Lalayau Rt.3, Kab.Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
127	M. IFDALI	JUT	Desa Mihu, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
128	M. IFDALI	pembangunan jalan produksi	Desa Sungai Batung Rt 01 Kec.Juai , Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
129	M. IFDALI	Pembangunan Jalan Produksi	Desa Sungai Batung RT 03 KecJUAL, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
130	M. IFDALI	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	DESA Lalayau RT 01 S/D 05 Kec juai, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
131	M. IFDALI	pembangunan jalan produksi	Desa pamurus Rt 01,02 , dan 03 Kec. Juai , Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
132	M. IFDALI	pembangunan JUT	Desa Mihu Rt 01 ,04 & 05 kec.Juai , Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

133	M. IFDALI	perbaikan/ rehabilitasi jalan JUT	Desa Mihu Rt 01 S/d 05 Kec.Juai, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
134	M. IFDALI	pembangunan JUT Lio	Desa Teluk Bayur Rt 01 S/d 05 Kec . Juai , Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
135	M. IFDALI	pembangunan JUT Jutuh	Desa teluk Bayur Rt 01 kec . Juai	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
136	M. IFDALI	pembangunan jalan produksi	desa sumber rejeki Rt 01 S/d 15 ,Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
137	M. IFDALI	Pembangunan JUT	Desa Mihu Rt.04 Kec. Juai, Kab.Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
138	M. IFDALI	rehabilitasi jalan Jut lokdalan Rt 01 150 M	Desa Bata Rt 01 kec . Juai , Kab.Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
139	M. IFDALI	Jalan Produksi	Baruh Panyambaran Rt. 2, Kab.Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
140	M. IFDALI	JUT	Desa Baruh Panyambaran Rt. 2,Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
141	M. IFDALI	JALAN PRODUKSI	Desa lalayau, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
142	M. IFDALI	Jalan Produksi	Desa MIHU, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
143	M. IFDALI	Pembuatan JUT Tambiripan	Desa Lalayau	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
144	M. IFDALI	Pembuatan JUT Muri	Desa Mihu RT.5	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
145	M. IFDALI	Peningkatan JUT Pabrik	Desa Baruh Panyamabaran RT.2	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
146	M. IFDALI	Pembuatan JUT Dukuh	Desa Baruh Panyambaran RT.1	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
147	M. IFDALI	Pembauatan JUT Padaharan	Desa Buntu Karau RT.1	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
148	M. IFDALI	Pembuatan Jalan Produksi	Desa Hauwai RT.9	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
149	M. IFDALI	Balai Pertemuan Pertanian	Desa Binju	Rp -	TIDAK ADA KELOMPOK PENGUSUL	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
150	M. IFDALI	Balai Pertemuan Pertanian	Desa Jungkal	Rp -	TIDAK ADA KELOMPOK PENGUSUL	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
151	M. IFDALI	Balai Pertemuan Pertanian	Desa Lampihong Kiri	Rp -	TIDAK ADA KELOMPOK PENGUSUL	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya

152	M. IFDALI	pengadaan bibit sawit kel.tani kec. Juai	KEC. JUAI , Kab. Balangan	Rp 200.000.000	Setuju,tetapi proposal belum ada	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
153	M. IFDALI	pengadaan ternak kambing kel.tani desa buntu karau	desa buntu karau kec. juai, Kab.Balangan	Rp 200.000.000	YANG DI SK KEL. TANI BUNTU KARAU	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Rp 7.000.000.000		
4	NIKMAH	PEMBUATAN JALAN USAHA TANI KEC. PARINGIN SELATAN DESA MARADAP RT 3	KEC. PARINGIN SELATAN DESA MARADAP RT 3, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4	NIKMAH	PEMBUATAN JALAN USAHA TANI KEC. BATUMANDI DESA RIWA RT 1	KEC. BATUMANDI DESA RIWA RT.01, Kab. Balangan	Rp 150.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
6	NIKMAH	PEMBUATAN JALAN USAHA TANI KEC. PARINGIN DESA KALAHIAN RT 1	KEC. PARINGIN DESA KALAHIAN RT 1, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
8	NIKMAH	PEMBUATAN JALAN USAHA TANI KEC. PARINGIN SELATAN DESA BUNGIN RT 3	KEC. PARINGIN SELATAN DESA BUNGIN RT 3, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
9	NIKMAH	PEMBUATAN JALAN USAHA TANI KEC. BATUMANDI DESA BUNGUR RT 2 & 3	KEC. BATUMANDI DESA BUNGUR RT 2 & 3, Kab. Balangan	Rp 150.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Rp 900.000.000		
159	NUR FARIANI	Pembangunan Pondok Pertemuan Keltan Harapan Tani	Desa Banua Hanyar RT.2	Rp 84.900.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
160	NUR FARIANI	Pembuatan Balai Pertemuan Kelompok Bunga Balai		Rp 84.900.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
161	NUR FARIANI	Rehab Pembangunan JUT	Desa Ajung RT.2	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
162	NUR FARIANI	Rehab/Pembangunan JUT	Desa Piyait RT.3	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
163	NUR FARIANI	Pembangunan / Rehab Jalan Produksi	Desa Gunung Manau RT.4	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
164	NUR FARIANI	Gubuk Pembuatan Pupuk Organik Merak I	Sungai Pumpung	Rp -	TIDAK MEMFASILITASI UNTUK PRODUKSI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
165	NUR FARIANI	Pengadaan Bibit Sawit Kelompok Maju Bersama (10)	Desa Tangalin	Rp 95.000.000	Setuju,tetapi proposal belum ada	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

166	NUR FARIANI	Pengadaan Bibit Sawit (10)	Desa Karuh	Rp 95.000.000	Setuju,tetapi proposal belum ada	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
167	NUR FARIANI	Pengadaan Bibit Sawit (10)	Desa Kedondong	Rp 95.000.000	Setuju,tetapi proposal belum ada	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
168	NUR FARIANI	Pengadaan Bibit Sawit (10)	Desa Sungai Pumpung	Rp 95.000.000	Setuju,tetapi proposal belum ada	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Rp 1.149.800.000		
169	SAMSUDINOR	Pengadaan Tanaman Hdiroponik Kelompok Tani Bina Bersama Kelurahan Paringin Kota	KELURAHAN PARINGIN KOTA	Rp 150.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
170	SAMSUDINOR	Pengadaan Pupuk ,dan Herbisida Kelompok Tani Haur Kuning Kelurahan Paringin kota	KELURAHAN PARINGIN KOTA	Rp 150.000.000	Pindahan dari rencana Perubahan 2024	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Rp 300.000.000		
171	HJ. SRI HURIYATI	peningkatan jalan JUT Kel . Tani Usaha Bersama	Desa Simpang Tiga Kec. Lampihong , Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
172	HJ. SRI HURIYATI	JUT Kelompok Tani Cipta Banua	DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN LAMPIHONG KAB. BLG, Kab. Balangan	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
173	HJ. SRI HURIYATI	penigkatan Balai Pertemuan Kel. Tani Cipta Banua	Desa Simpang Tiga RT. 3 Kec. Lamphong , Kab. Balangan	Rp 84.900.000	BELUM ADA KELOMPOK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
174	HJ. SRI HURIYATI	permohonan Bantuan Hewan Ternak Itik untuk produksi Kel. Tani Berkat Cangkal	Desa Simpang Tiga Kec. Lampihong , Kab. Balangan	Rp 100.000.000		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Rp 584.900.000		
175	SUPIANOR	JUT Mabulang	Mabulang Desa Halong Rt.3 Kec. Halong	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
176	SUPIANOR	JUT arah Gunung Balawanai	Desa Hauwai Rt.09 Kec. Halong	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
177	SUPIANOR	Jalan Produksi Kelompok Tani Tunas Harapan	Desa Suryatama Kec. Halong	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Rp 600.000.000		

178	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pemubuatan Jalan Produksi Simpang Pelasongan	Desa Guha	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
179	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Jalan Usaha Tani Hantanung 1	Desa Gunung Batu	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
180	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Jalan Usaha Tani Bangkinang Batu Hadangan	Desa Tebing Tinggi	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
181	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kandang Sapi	Desa Putat Basiun	Rp -	TIDAK ADA NAMA KELOMPOK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
182	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kandang Sapi	Desa Bihara Hilir	Rp -	TIDAK ADA NAMA KELOMPOK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
183	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kandang Sapi	Desa Kedondong RT.04	Rp -	TIDAK ADA NAMA KELOMPOK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
184	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Balanti RT.04	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

185	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Jalan Produksi	Desa Juuh	Rp 200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
186	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Jalan Produksi	Desa Baru	Rp 200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
187	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pengadaan Traktor Mini / Cultivator (Kel. Berkat Bersama)	Desa Riwa	Rp 25.200.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
188	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pengadaan Coltivatur 2 Buah (Kel. Panca Tujuh)	Desa Mayanau	Rp 50.400.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
189	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pengadaan Pupuk Mutiara dan Obat Semprot Poktan (Kel. Sumber Makmur 2)	Desa Mayanau	Rp 50.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
190	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pengadaan Keramba Ikan, Bibit dan Pakan	Desa Mayanau	Rp 100.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
191	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pengadaan Pakan Ikan (Kel. Agarung Permai)	Desa Pulantan RT. 04	Rp 100.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

192	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Guha	Rp 200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
193	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Sikontan	Rp 200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
194	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan Batu Hadangan	Desa Tebing Tinggi	Rp 200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
195	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Juuh	Rp 200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
196	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan dan Pengadaan Bibit dan Pakan	Desa, Hamparaya RT. 04	Rp 200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
197	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Tangalin RT. 03	Rp 200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
198	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Gunung Batu	Rp 200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

199	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Baru RT. 04	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
200	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pengadaan Bioflok (Pokdakan Mayanau Sejahtera)	Desa Mayanau	Rp 100.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
201	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Mantimin	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
202	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Kolam Ikan	Desa Sungsum	Rp 200.000.000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
203	SYAHBUDIN, S.SOS.I, MM	Pembuatan Gudang/ Lumbung Padi	Desa Putat Basiun RT. 01	Rp 156.046.500	PAGU SEHARUSNYA 156.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
				Rp 3.781.646.500		
204	SAIFULLAH, S.SOS	Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Produksi (JUP)	Desa Juai	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
205	SAIFULLAH, S.SOS	Pembangunan/Pembuatan Jalan Usaha Produksi (JUP)	Desa Mungkur Uyam	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

206	SAIFULLAH, S.SOS	Pembangunan/Pembuatan Jalan Usaha Produksi (JUP)	Desa Galumbang	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
207	SAIFULLAH, S.SOS	Pembangunan/Pembuatan Jalan Usaha Produksi (JUP)	Desa Bata	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
208	SAIFULLAH, S.SOS	Pembangunan/Pembuatan Jalan Usaha Produksi (JUP)	Desa Teluk Bayur	Rp 200.000.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
209	SAIFULLAH, S.SOS	Pembangunan/Pembuatan Lumbung Padi/Gudang Padi	Desa Galumbang	Rp 156.046.500	PAGU SEHARUSNYA 156.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
				Rp 1.156.046.500		

Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
1	PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT	Dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui kelompok LPM untuk pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif. LPM berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya/paceklik,antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif	Ketahanan Pangan
2	P2L (PEKARANGAN PANGAN LESTARI)	Pemanfaatan pekarangan sebagai tempat budidaya sayur mulai dikembangkan. Pengembangan pekarangan merupakan wujud dari implementasi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Dampak-dampak yang diperoleh setelah melaksanakan program P2L menjadi indikator keberhasilan program tersebut. Program P2L yang tidak menuai hasil optimal dapat diindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan konsep dan arahan yang diberikan. Perlunya evaluasi dari sisi pembuat dan pelaksana program untuk keberlanjutan program.	Ketahanan Pangan
3	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN (PENANGANAN KERAWANAN PANGAN)	Pengembangan Desa Mandiri Pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat dengan sasaran yaitu rumah tangga di daerah rawan pangan. Dampak sosial yang diharapkan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Dan berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat di pedesaan.	Ketahanan Pangan
4	Prasarana Pertanian	Analisa dampak sosial pengadaan prasarana pertanian : Pemerintah Kabupaten Balangan melalui DKP3	P5

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
		Bidang P5 bertujuan dengan memberikan bantuan berupa JUT, Jalan Produksi dan Prasarana Lainnya ke masyarakat agar dapat membantu masyarakat untuk membawa hasil panen serta mempermudah akses kelompok tani untuk menjual hasil panen mereka ke kota, dengan adanya bantuan prasarana pertanian ke masyarakat diharapkan mampu meningkatkan hasil panen kelompok tani, mempermudah aksen petani menuju tempat usaha tani.	
5	Sarana Alsintan	Analisa dampak sosial pengadaan Sarana Alsintan Pertanian : Pemerintah Kabupaten Balangan melalui DKP3 Bidang P5 bertujuan dengan memberikan bantuan alsintan ke kelompok tani agar dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mempercepat kegiatan usaha tani yang tadinya bersifat tradisional kearah modern agar bisa mengurangi biaya produksi, menghemat waktu dan tenaga.	P5
6	Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani	Analisa dampak sosial peningkatan skor kelas kelompok tani : Pemerintah Kabupaten Balangan melalui DKP3 Bidang P5 bertujuan dengan memberikan peningkatan skor kelas kelompok tani agar dapat menjadi acuan bagi penyuluh untuk menyiapkan bahan penyusunan materi dan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan klasifikasi kelompok tani, dapat mengetahui tingkat kemampuan kelompok tani sehingga dapat di tetapkan klasifikasi kelompok tani, tersedianya bahan pertimbangan untuk menetapkan pemberian penghargaan kepada kelompok tani yang berprestasi	P5
7	Peningkatan Indeks Pertanaman	Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan antara peningkatan populasi penduduk dengan perluasan lahan pertanian. Lahan produktif yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian telah banyak dikonversi menjadi lahan non pertanian guna memenuhi kebutuhan pemukiman penduduk. Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya yaitu semakin menurunnya luas pemilikan lahan oleh petani karena alih fungsi lahan pertanian ke lahan pemukiman ataupun	TPH

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
		<p>perindustrian yang tidak dibarengi dengan perluasan lahan sawah yang seimbang. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, tentu akan menyebabkan penurunan produksi pertanian termasuk menurunnya produksi beras. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penurunan produksi hasil pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah melalui Intensifikasi. Yaitu peningkatan Indeks pertanaman dimana petani semula hanya menanam 1 kali dalam setahun di lahan yang sama diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dengan lebih dari 1 kali dalam setahun di lahan yang sama. Cara ini diharapkan mampu menambah ekonomi masyarakat yang biasanya hanya 1 kali dalam setahun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya saja, namun bisa menghasilkan lebih dari 1 kali musim tanam sehingga bisa menambah produksi dan menambah perekonomian. Pada Tahun 2022 alokasi anggaran untuk peningkatan IP seluas 225 Ha yang pada Tahun 2021 hanya menganggarkan seluas 200 Ha.</p>	
8	PENGADAAN CABE MERAH	<p>Analisa dampak sosial pengadaan bawang Merah ; Pemerintah Kabupaten Balangan melalui DKP3 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertujuan dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bibit cabe ke masyarakat atau desa bertujuan untuk dikelola oleh masyarakat sehingga 3 bln ke depan bisa menghasilkan buah cabe, yang nantinya juga selain untuk meningkatkan stock di level desa, juga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat.</p>	TPH
9	PENGADAAN BAWANG MERAH	<p>Analisa dampak sosial pengadaan bawang Merah ; Pemerintah Kabupaten Balangan melalui DKP3 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertujuan dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bibit Bawang Merah ke masyarakat atau desa bertujuan untuk dikelola oleh masyarakat sehingga 3 bulan ke depan bisa menghasilkan bawang merah, yang nantinya juga selain untuk meningkatkan stock di level desa, juga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat.</p>	TPH

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
10	PENGADAAN BENIH PORANG	Analisa dampak sosial ekonomi masyarakat bantuan bibit porang : pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas yang mempunyai nilai ekspor, dengan dibantu melalui bibit porang yg bermutu (sertifikat) diharapkan hasilnya pun akan meningkat baik kuantitas maupun secara kualitas, dgn bantuan bibit ini dapat mengurangi input modal petani terhadap bibit yang sangat signifikan sehingga hasil panen dari petani dengan pengurangan input modal bibit ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian masyarakat pedesaan	TPH
11	TERSEDINYA CHIP PORANG KUALITAS EKSPOR	Untuk meningkatkan nilai tambah porang menjadi bahan setengah jadi, dengan chip harga yang didapatkan petani dengan jauh lebih tinggi dari hasil penjualan umbi biasa dan ini merupakan suatu upaya dalam meningkatkan pendapatan petani	TPH
12	TERLAKSANYA PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (PASCA PANEN)	Analisa dampak, seperti kita ketahui hasil produk pertanian bersifat gampang rusak, dengan adanya pelatihan pengolahan selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian tersebut, juga untukantisipasi saat panen raya dengan melimpahnya produksi sehingga produksi yang dihasilkan baik segi harga dan kualitas tetap bisa terjaga dan penghasilan petani meningkat	TPH
13	TERSEDINYA PENANGKARAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dengan adanya penangkaran benih tph, mempermudah akses petani dalam memperoleh sumber benih yg bermutu untuk menghasilkan produksi yang tinggi	
14	Pelayanan IB di 8 Kecamatan	Analisa dampak sosial/ ekonomi Pelayanan Inseminasi Buatan yaitu peternak dapat menghemat biaya pemeliharaan tanpa perlu memelihara ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik dan mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina sehingga nilai jual ternak lebih tinggi	Peternakan dan Puskesmas dan IB
15	Penyebaran Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat	Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan dan dampak sosial/ekonomi dari ternak yang disebar kepada masyarakat adalah untuk menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan	Peternakan

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
		protein hewani, untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja, untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup, dan Peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan	
16	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Analisa dampak sosial/ ekonomi dari meningkatnya sarana peternakan adalah selain sebagai tempat tinggal ternak juga merupakan tempat bekerja si peternak terutama dalam hal melayani kebutuhan hidup sehari-hari seperti memberi makan dan minum, mengobati ternak yang terserang penyakit, membersihkan kandang dari berbagai macam kotoran dan sebagainya. Peternak harus dapat menciptakan kandang yang sehat dan nyaman agar ternak yang tinggal didalamnya merasa kerasan dan senang karena terhindar dari gangguan binatang buas dan sebagainya. Kandang yang aman dan nyaman akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ternak yang dipelihara.	Peternakan
17	Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak	Analisa dampak sosial/ ekonomi Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan Ternak yaitu mencegah masuknya bibitnya penyakit dan mengobati ternak yang sakit sehingga dapat menekan angka kematian ternak yang merugikan peternak.	Peternakan
18	Kelompok Usaha Peternakan yang dibina	Analisa dampak sosial/ ekonomi Kelompok Usaha Peternakan yang dibina yaitu anggota kelompok usaha peternakan yang dibina mendapatkan keterampilan terkait pengolahan hasil peternakan sehingga dapat tercipta usaha baru (<i>home industry</i>) yang dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok.	Peternakan
19	Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	Analisa dampak sosial/ ekonomi Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan yaitu peternak dapat menambah pengetahuan terkait penyakit hewan menular sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat adanya ternak yang sakit atau mati.	Peternakan
20	Peningkatan Produksi Perikanan	Kualitas perairan yang semakin menurun mengakibatkan produktivitas kegiatan budidaya ikan semakin rendah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lebih lambat sehingga waktu budidaya semakin panjang dan pakan yang diberikan menjadi lebih banyak,	Perikanan

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
		sehingga biaya produksi tinggi dengan keuntungan yang semakin kecil. Karena kualitas perairan yang rendah juga mengakibatkan tingkat kematian (mortalitas) ikan budidaya semakin tinggi yang juga mengakibatkan produksi rendah. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin berkurangnya luasan perairan untuk area penangkapan ikan karena alih fungsi lahan. Semakin dangkalnya perairan dan kualitas dan kualitas perairan yang semakin menurun yang mengakibatkan semakin menurunnya produksi perikanan tangkap.	
		Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penurunan produksi perikanan adalah melalui intensifikasi dan penerapan teknologi yang lebih maju pada kegiatan pembudidayaan ikan. Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dengan menjaga kelestarian sumberdaya perairan dan pemulihan perairan serta mencegah penangkapan ikan dengan cara illegal fishing.	Perikanan
		Hasil produk perikanan bersifat gampang rusak dengan adanya pengolahan hasil perikanan akan meningkatkan nilai tambah produksi perikanan tersebut dan sebagai usaha untukantisipasi saat panen raya dengan melimpahkan produksi sehingga harga tetap stabil.	Perikanan
21	Peremajaan Karet	Kabupaten Balangan yang memiliki komoditas utama tanaman perkebunan adalah karet, dimana tanaman karet menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga petani dilabangan dengan luas 37.800 hektar dimana seluas 3.000 hektar lebih merupakan tanaman rusak dan tanaman tua terutama ec TCSSP. Terhadap tanaman tua yang sudah tidak produktif dan tidk menghasilkan karet lagi harus dilakukan peremajaan / replanting. Namun kegiatan peremajaan dilaksanakan berdasarkan adanya usulan dari petani melalui kelompok sebagai bukti minat. Sumber dana kegiatan peremajaan karet dapat melalui APBD Kabupaten, Provinsi terutama dari APBN. Kegiatan Peremajaan ini dalam rangka pengembangan klon unggul baru dengan jumlah produktivitas lebih tinggi, sehingga dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan petani.	Perkebunan

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
22	Bantuan Bibit Kelapa Sawit	Dalam rangka diversifikasi tanaman perkebunan yang diusahakan petani untuk pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan	Perkebunan
23	Bantuan Bibit Aren	Dalam rangka diversifikasi tanaman perkebunan yang diusahakan petani untuk pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan	Perkebunan
24	Bantuan Bibit Kelapa	Dalam rangka diversifikasi tanaman perkebunan dan pengembangan varietas unggul yang memiliki keunggulan lokal dalam produksi dan produktivitas yang diusahakan petani untuk pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan	Perkebunan
25	Bantuan Pupuk	Sehubungan petani umumnya tidak mampu membeli pupuk dan melakukan pemupukan tanaman, sementara kegiatan pemupukan sangat diperlukan dalam rangka peningkatan produktivitas dan kesuburan tanaman, maka perlu adanya bantuan dari pemerintah berupa pupuk kepada petani bisa melalui kegiatan intensifikasi atau merupakan paket kegiatan peremajaan	Perkebunan
26	Bantuan Alat pasca Panen	Penyediaan bantuan alat pasca panen baik tanaman karet maupun tanaman lainnya seperti kelapa sawit adalah dalam rangka pendampingan pengelolaan pasca panen hasil tanaman agar kualitas hasil sesuai standar dan rekomendasi pemerintah. Kualitas hasil yang baik akan meningkatkan harga jual dan meningkatkan pendapatan petani	Perkebunan
27	Bantuan Pembeku Lateks	Penyediaan bantuan pembeku lateks untuk tanaman karet adalah dalam rangka pendampingan pengolahan hasil oleh petani dalam rangka pelaksanaan Gerakan Bokar Bersih yaitu dengan penggunaan pembeku anjuran pemerintah, karena kebiasaan petani saat ini masih terdapat kebiasaan petani menggunakan pembeku yang tidak dianjurkan seperti penggunaan pupuk untuk pembeku. Pengolahan bokar dengan pembeku anjuran dapat meningkatkan kualitas dan akan meningkatkan nilai jual karet untuk peningkatan pendapatan petani. Bantuan pembeku diutamakan bagi UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) yang telah dibentuk.	Perkebunan
28	Bantuan Obat-obatan Tanaman Perkebunan (Karet)	Sebagai akibat pemeliharaan tanaman yang kurang seperti kurangnya pemupukan tanaman karet dan	Perkebunan

No	Kegiatan Utama	Analisis Dampak Sosial/ Ekonomi Untuk Kemanfaatan Kegiatan	Bidang
		<p>penyadapan yang berlebih karena tingkat kebutuhan petani yang hanya mengandalkan dari kebun, dapat menyebabkan kerentanan serangan penyakit seperti Jamur Akar Putih dan Kering Alur Sadap serta penyakit Gugur Daun Karet (GDK). Terhadap serangan penyakit ini umumnya petani tidak ada tindakan pengobatan cenderung membiarkan. Tanaman yang terserang penyakit dapat berakibat hilangnya hasil dan dapat menyebabkan tanaman mati dan roboh. Hal ini menyebabkan hilangnya sumber pendapatan petani. Pembagian obat-obatan tanaman perkebunan ini dalam rangka mengurangi beban petani dan memberikan pertolongan petani dalam pemeliharaan dan pengobatan penyakit tanaman karet. Bantuan yang diberikan dapat berupa penyaluran obat langsung ke kelompok atau dengan melakukan tindakan langsung pengobatan ke kebun petani atau dengan pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan obat dan pengendali penyakit secara sederhana untuk kemandirian petani dalam pengendalian penyakit.</p>	
29	Pembibitan / Pemijahan Ikan Unggul	<p>Menyediakan bibit Ikan Yang berkualitas Sesuai Dengan Standarisasi Operasional Prosedur, dan menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang baik Guna Pemenuhan Kebutuhan Akan Kebutuhan Bibit Ikan di Kabupaten Balangan. Secara Keseluruhan Kabupaten Balangan Memerlukan Bibit Ikan Unggul 3.000.000 ekor Sedangkan Kapasitas Balai benih Ikan Lokal Untuk Keadaan Saat Ini hanya 1.000.000 Ekor yang mana dengan Keadaan Kondisi Balai Benih Ikan Bisa Digunakan Secara maksimal 1.600.000 Ekor</p>	BBI Gunung Manau
30	TERSEDIANYA BENIH KELAS TINGGI YANG BERSERTIFIKAT/BERLABEL	<p>Analisa dampak sosial ekonomi untuk tersedianya benih kelas tinggi di Kabupaten ini yaitu dengan meningkatkan produksi dan ketersediaan benih kelas tinggi pada penangkar-penangkar binaan kita yang ada di Kabupaten sehingga kebutuhan benih kelas tinggi / bermutu bisa terpenuhi.</p>	BB Hamparaya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPP) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJMD) 2016-2021.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

2.5.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2.5.2 Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

2.5.3 Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

2.5.4 Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

2.5.5 Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”
Berlandaskan Gotong Royong”**

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi

dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :

1. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024), Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024, Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
3. Prevalence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
4. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),
5. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020) dan 46,8 juta ton (th. 2024),
6. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
7. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
8. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :

- a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024),
- b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),
- c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
- d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
- e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator :

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),
- b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

Pembangunan pertanian secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dimana dalam membangun pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) sasaran strategis pertanian :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, dan lainnya)
2. Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian
3. Meningkatnya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bio-energi
4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2021-2026, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Adapun secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran tersebut dimaksudkan dalam rangka Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

Matriks Perencanaan Kinerja Tahun 2021 –2026
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Balangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produksi sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Persentase peningkatan Produksi sektor Tanaman Pangan, Hortikultura	0,5%	0,75%	1,0%	1,25%	1,50%	1,75%
			Persentase peningkatan Produksi sektor Perkebunan	0,5%	0,75%	1,0%	1,25%	1,50%	1,75%
			Persentase peningkatan Produksi sektor Peternakan	8%	8%	4%	8%	8%	8%
			Persentase peningkatan Produksi sektor Perikanan	11%	22,2%	33,4%	44,6%	55,8%	67,0%
			Persentase						

		Meningkatnya penguatan nilai tambah hilirisasi produksi sektor perikanan	Pertumbuhan Hilirisasi Sektor Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Peningkatan Skor PPH Ketersediaan	1,25%	1,50%	1,75%	2%	2,25%	2,50%
			Persentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi	1,25%	1,50%	1,75%	2%	2,25%	2,50%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomian Berbasis Pertanian Dan Perkebunan Dan Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebanyak 14 program, yang terdiri dari 1 program penunjang, 5 Program Urusan Pertanian, 4 Program urusan Pangan dan 4 Program urusan Kelautan dan perikanan.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebanyak 32 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang dan 25 Kegiatan yang mendukung pencapaian isu strategis.
3. Terdapat 4 kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan data pilah yaitu kegiatan Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan. Kegiatan-kegiatan tersebut secara eksplisif dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian dan perikanan, dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini peran serta wanita dalam pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pertanian dan perikanan.

4. Terdapat 5 kegiatan yang secara langsung terkait dengan pencapaian peningkatan produksi pertanian dan 1 kegiatan untuk pencapaian peningkatan produksi perikanan. Serta 1 kegiatan untuk menunjang ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah.
5. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 134,082.680.946,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

- Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

a. Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

a. Pembangunan Prasarana Pertanian

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya

IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan

V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

VII. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

VIII. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
- Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
- Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal

4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

IX. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
- Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

X. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

XII. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. *Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*

- Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budiyaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

XIII. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. *Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota*

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota

XIV. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. *Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skla Mikro dan Kecil

2. *Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota*

- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024, disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2022. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan seperti APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, DAK dan lain-lain yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pada tahun 2024 jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan adalah sebesar Rp 134.082.680.946,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional rutin wajib Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan : Rp. 29.926.407.546,-
2. Belanja Operasional non rutin Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan : Rp. 15.786.956.800,-
3. Belanja Prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan untuk mendukung pencapaian IKU dan menjawab isu strategis Tahun 2024 : Rp. 88.369.316.600,-
4. Belanja-belanja lainnya yang sudah diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi, APBN dan DAK Tahun 2024.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang bersumber dari
APBD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel T-C.33

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Balangan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	4	8	9	15	16	17
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			277.594.869.744,00		93.654.469.057,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.966.491.796,00		470.500.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			5.966.491.796,00		470.500.000,00	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	1 %	2.602.719.896,00	1 %	470.500.000,00	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2.602.719.896,00	2 Unit	470.500.000,00	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit	2.243.709.396,00	2 Unit	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12 Laporan	359.010.500,00	12 Laporan	220.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Konsumsi	88.24 % 89.16 %	2.600.000.200,00	88.24 % 89.16 %	0,00	

	PANGAN MASYARAKAT						
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen pendukung stabilitas pasokan dan harga pangan yang tersedia Jumlah kegiatan pendampingan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	12 Dokumen 2 Kegiatan 3 Unit	1.478.031.200,00	12 Dokumen 2 Kegiatan 3 Unit	0,00	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	12 Laporan	117.389.200,00	12 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya							
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	4.075.000,00	12 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	551 Keluarga	746.697.000,00	551 Keluarga	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota							
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	4 laporan	219.915.000,00	4 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis	2 Laporan	3.010.000,00	2 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,

		sumber daya lokal					PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota							
		Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4.565.000,00	12 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis							
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 Laporan	81.270.000,00	4 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan							
		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	228.000.000,00	12 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)							
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	73.110.000,00	1 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersalurkan Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	52 Ton 14277 Ton	896.540.000,00	52 Ton 14277 Ton	0,00	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal							
		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	4.200.000,00	1 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							

		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Ton	800.800.000,00	52 Ton	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota							
		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	52 Ton	91.540.000,00	52 Ton	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Penentuan perumusan dan rekomendasi terkait harga minimum pangan pokok lokal	1 Dokumen	5.900.000,00	1 Dokumen	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal							
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	4 Laporan	5.900.000,00	4 Laporan	5.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Direktori konsumsi pangan Kabupaten	1 Dokumen	219.529.000,00	1 Dokumen	219.529.000,00	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	3.640.000,00	1 Dokumen	3.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	215.889.000,00	4 Laporan	215.889.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	20 %	677.674.500,00	20 %	677.674.500,00	

	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	147.010.500,00	1 Dokumen	147.010.500,00	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	147.010.500,00	1 Dokumen	147.010.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang terlaksana Jumlah Peta dan Analisis Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen 1 Dokumen	530.664.000,00	1 Dokumen 1 Dokumen	530.664.000,00	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	182.486.000,00	1 Dokumen	182.486.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 Laporan	334.678.000,00	4 Laporan	334.678.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi							
		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0 Dokumen	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.500.000,00	1 Dokumen	13.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90 %	86.097.200,00	90 %	86.097.200,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang di uji mutu dan keamanannya	12 Dokumen	86.097.200,00	12 Dokumen	86.097.200,00	
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan							
		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	6.331.000,00	1 Dokumen	6.331.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.893.200,00	1 Dokumen	50.893.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Laporan	28.873.000,00	4 Laporan	28.873.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				271.628.377.948,00		271.628.377.948,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				86.227.797.550,00		86.227.797.550,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	5 5 %	366.461.000,00	5 5 %	366.461.000,00	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	1043.9 Ton	366.461.000,00	1043.9 Ton	366.461.000,00	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							

		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	118.461.000,00	4 Dokumen	118.461.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap							
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	25 Unit	248.000.000,00	25 Unit	248.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	3.75 % 50.80 %	83.799.485.150,00	3.75 % 50.80 %	83.799.485.150,00	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelembagaan kelompok perikanan yang meningkat kelasnya (Kelompok)	6 Kelompok	381.168.100,00	6 Kelompok	381.168.100,00	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	203.289.000,00	5 Kelompok	203.289.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8 Kelompok	177.879.100,00	8 Kelompok	177.879.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah peningkatan bibit ikan unggul yang dihasilkan (Ekor) Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	1500000 Ekor 918,1 Ton	83.418.317.050,00	1500000 Ekor 918,1 Ton	83.418.317.050,00	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	75.160.000,00	4 Dokumen	75.160.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120 Unit	83.343.157.050,00	120 Unit	83.343.157.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)	20 %	519.020.800,00	20 %	519.020.800,00	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Luas kawasan perikanan lestari yang terawasi (Ha)	324 Ha	519.020.800,00	324 Ha	519.020.800,00	
Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan							
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	10 Orang	519.020.800,00	10 Orang	519.020.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (%)	86 %	1.542.830.600,00	86 %	1.542.830.600,00	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang terstandar	1 Unit Usaha	43.165.000,00	1 Unit Usaha	43.165.000,00	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko							
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha	1 Unit Usaha	43.165.000,00	1 Unit Usaha	43.165.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang diberikan fasilitas (Unit Usaha)	1 Unit Usaha	1.499.665.600,00	1 Unit Usaha	1.499.665.600,00	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Ton	750.310.200,00	100 Ton	750.310.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	749.355.400,00	10 Pelaku Usaha	749.355.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				185.400.580.398,00		185.400.580.398,00	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	74 % 84 %	37.333.542.999,00	74 % 84 %	37.333.542.999,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	1.320.480.000,00	100 %	1.320.480.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.095.613.500,00	12 Dokumen	1.095.613.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.705.000,00	1 Dokumen	19.520.865,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN

							PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22.705.000,00	1 Dokumen	25.033.365,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.580.000,00	1 Dokumen	14.971.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	16.080.000,00	1 Dokumen	17.728.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	113.601.000,00	4 Laporan	1.252.451.025,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.478.000,00	4 Laporan	11.551.995,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	17.582.000,00	1 Dokumen	17.582.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	13.135.500,00	1 Data	13.135.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 %	23.181.321.642,00	100 %	32.531.852.950,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan	22.831.556.642,00	131 Orang/bulan	29.542.296.735,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	306.360.000,00	12 Dokumen	2.967.470.465,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.902.500,00	1 Laporan	8.397.875,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	31.502.500,00	1 Dokumen	13.687.875,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	0	0,00	100 %	15.010.375,00	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah							

		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0,00	1 Laporan	15.010.375,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 %	2.295.928.000,00	100 %	2.295.928.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	674.728.000,00	3 Paket	674.728.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	1.621.200.000,00	140 Orang	1.621.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	3.014.861.500,00	100 %	1.900.329.285,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	127.723.500,00	2 Paket	1.758.164.909,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	827.836.400,00	7 Paket	827.836.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	637.463.400,00	7 Paket	637.463.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

							PERIKANAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	105.478.200,00	2 Paket	135.440.890,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	23.790.000,00	2 Dokumen	6.723.486,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1861 Laporan	1.292.570.000,00	1861 Laporan	1.292.570.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 %	3.387.101.645,00	100 %	3.387.101.645,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	708.583.000,00	9 Unit	708.583.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	68 Unit	174.061.200,00	68 Unit	174.061.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	281.104.600,00	9 Unit	281.104.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Aset Tak Berwujud							
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.223.352.845,00	5 Unit	2.223.352.845,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	12 Bulan	3.225.620.712,00	12 Bulan	3.225.620.712,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.000.000,00	12 Laporan	13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	466.175.500,00	12 Laporan	466.175.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.746.445.212,00	12 Laporan	2.746.445.212,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	12 Bulan	908.229.500,00	12 Bulan	908.229.500,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	526 Unit	858.206.700,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	50.022.800,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktifitas Perkebunan Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	10 % 1.10 1.10 % 1.10 undefined 6 %	67.089.408.029,00	-	28.810.796.908,00	

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Bibit atau Benih Padi BD dan BP yang berserifikat Jumlah luas peremajaan karet dan luas diversifikasi tanaman perkebunan Jumlah Sarana Hortikultura yang tersedia Jumlah Sarana Produksi untuk Pemeliharaan Kebun Daerah Jumlah Sarana Tanaman Pangan yang tersedia	8.5 Ton 75 Ha 10 Paket 1 Paket 14 Paket	52.982.411.860,00	8.5 Ton 75 Ha 10 Paket 1 Paket 14 Paket	28.810.796.908,00	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	0,00	4 Laporan	300.235.556,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	52.115.501.860,00	12 Laporan	22.448.392.855,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih							
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	7 Ton	779.250.000,00	7 Ton	5.973.968.497,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan							
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	4 Laporan	33.500.000,00	4 Laporan	22.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan							
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	4 Laporan	0,00	4 Laporan	22.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan							
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	4 Laporan	27.080.000,00	4 Laporan	22.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura							
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	4 Laporan	27.080.000,00	4 Laporan	22.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kelahiran ternak hasil IB	0	0,00	-	0,00	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pakan yang beredar	0	0,00	-	0,00	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak							
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah penambahan populasi ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	7675 Ekor	14.106.996.169,00	7675 Ekor	14.106.996.169,00	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							

		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	7548 Ekor	13.643.869.000,00	7548 Ekor	13.643.869.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	383 Dosis	463.127.169,00	383 Dosis	463.127.169,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	20 % 8 %	70.005.531.320,00	20 % 8 %	70.005.531.320,00	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	18 Pekerjaan	89.439.000,00	18 Pekerjaan	89.439.000,00	
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian							
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan							
		Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan							
		Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura							
		Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan						
	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan						
	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura						
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan						
	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota						
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						

	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	89.439.000,00	1 Dokumen	89.439.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpenuhi	37 Unit	69.916.092.320,00	37 Unit	69.916.092.320,00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	266.893.000,00	1 Unit	266.893.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	61.027.695.200,00	10 Unit	61.027.695.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0,00	0	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						

		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya							
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1.044.640.420,00	1 Unit	1.044.640.420,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	5.859.100.000,00	2 Unit	5.859.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	689.348.300,00	2 Unit	689.348.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak							
		Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	519.575.300,00	1 Unit	519.575.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas							
		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	508.840.100,00	1 Unit	508.840.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan							
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	1.227.877.850,00	100 %	1.227.877.850,00	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan surveilans pada Hewan	8 Kecamatan	106.286.750,00	8 Kecamatan	106.286.750,00	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular							
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan							
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	15 Wilayah	106.286.750,00	15 Wilayah	106.286.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	0 Laporan	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	1800 Ekor	467.155.600,00	1800 Ekor	467.155.600,00	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	467.155.600,00	12 Laporan	467.155.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah peningkatan SDM masyarakat dan petugas terhadap kesahatan masyarakat veteriner	1760 Orang	654.435.500,00	1760 Orang	654.435.500,00	

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan							
		Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	10 Orang	220.430.000,00	10 Orang	220.430.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan							
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	1750 Orang	434.005.500,00	1750 Orang	434.005.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
13	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 100 %	5.344.024.300,00	100 100 %	5.344.024.300,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	1640 %	5.344.024.300,00	1640 %	5.344.024.300,00	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	635 Ha	4.942.805.600,00	635 Ha	4.942.805.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	975 Ha	112.540.000,00	975 Ha	112.540.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	30 Ha	87.675.700,00	30 Ha	87.675.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							
		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	4 Laporan	201.003.000,00	4 Laporan	201.003.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
14	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	4,2 %	4.400.195.900,00	4,2 %	4.400.195.900,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Pengembangan Korporasi Petani Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	63 Kelompok 16 Kelompok 500 Orang	4.400.195.900,00	63 Kelompok 16 Kelompok 500 Orang	4.400.195.900,00	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	157 Unit	918.016.900,00	157 Unit	918.016.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	63 Unit	334.160.000,00	63 Unit	334.160.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	157 Unit	3.148.019.000,00	157 Unit	3.148.019.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian							
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian							
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	0	0,00		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
				277.594.869.744,00		93.654.469.057,00	

BAB V

PENUTUP

Renja SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

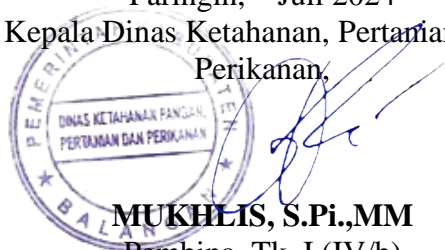
Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Pemerintah kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun Anggaran 2025 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain *input* yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas

pelaksanaan kegiatan. *Input* dan *proses* akan memberikan *benefit* dan *impact*

kepada *output* maupun *outcome*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada didalam Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia.

Dengan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

Paringin, Juli 2024
Kepala Dinas Ketahanan, Pertanian, dan
Perikanan,



MUKHLIS, S.Pi.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670818 199002 1 001

